

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**PEMBERDAYAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025**



Tim Peneliti :

Jabatan	Nama
Ketua	Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
Anggota	Ridwan Syam, S.Sos., M.Si Pratiwi Wulandari, S.Sos., M.Si Ahmad Muhajir, S.Sos., M.Si

**PUSAT PENELITIAN OPINI PUBLIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2025**

ABSTRAK

Kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar merupakan salah satu persoalan sosial yang terus berkembang akibat tekanan urbanisasi, kemiskinan struktural, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Meskipun berbagai program penanganan telah dijalankan pemerintah, seperti SLBM, P2KP, NUSSP, hingga KOTAKU, persoalan mendasar berupa perilaku sosial masyarakat dan lemahnya peran kelompok sosial masih menjadi faktor yang menghambat keberhasilan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk masalah sosial yang dihadapi masyarakat di kawasan kumuh, memetakan mengapa perilaku sosial belum berkontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas hidup, serta mengidentifikasi peran kelompok sosial dalam mendorong perubahan perilaku di tiga kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh tahun 2025, yaitu Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mariso.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan warga kawasan kumuh, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial yang berlangsung di kawasan kumuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan kumuh menghadapi beragam masalah sosial, seperti konflik antarkelompok, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, pengangguran, terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta kepadatan hunian yang ekstrem. Perilaku sosial masyarakat belum mendukung upaya penataan kawasan karena rendahnya kesadaran ekologis, normalisasi lingkungan tidak sehat, lemahnya kontrol sosial, dan minimnya kapasitas warga untuk menjaga lingkungan yang sudah ditata. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan kelompok sosial (RT/RW, kelompok nelayan, kelompok keagamaan, komunitas perempuan, maupun organisasi lokal lain) pada dasarnya memiliki potensi sebagai agen perubahan, namun belum memainkan peran signifikan karena terbatasnya dukungan kelembagaan, minimnya pelatihan pemberdayaan, serta absennya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan antara warga dan pemerintah kota.

Temuan ini menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak cukup mengandalkan intervensi fisik semata, tetapi harus didukung pendekatan sosial berbasis pemberdayaan komunitas. Kelompok sosial perlu diperkuat sebagai institusi lokal yang mampu meningkatkan kesadaran warga, mengorganisasi partisipasi, serta menjadi jembatan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2030 menuju permukiman yang layak, aman, dan berketahanan.

Kata kunci: *kawasan kumuh, perilaku sosial, masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, kelompok sosial, Makassar.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pernyataan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Desain Penelitian.....	16
B. Sumber Data	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	25
C. Model Pemberdayaan Aplikatif	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Kawasan Kelurahan Bontoraanu	19
Gambar 4.2 Peta Kawasan Kelurahan Tallo	21
Gambar 4.3 Kondisi Kawasan Pemukiman Kelurahan Bontorannu	22
Gambar 4.4 Kondisi Kawasan Pemukiman Kelurahan Tallo	24
Gambar 4.5 Skema Model Pemberdayaan	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan permukiman kumuh, masih menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi kota-kota di Indonesia maupun di mancanegara. Berbagai studi menjelaskan, bahwa penyebab makin meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan, karena arus urbanisasi yang makin besar. Lajunya angka pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung, juga menjadi salah satu penyebab masih banyak ditemui kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan (Rachman, Handoyo, and Harianto 2023). Fenomena urbanisasi telah memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola kehidupan masyarakat perkotaan termasuk meningkatnya kepadatan penduduk. Penyebab urbanisasi, salah satunya karena pembangunan yang tidak merata di wilayah pedesaan. Kurangnya kesempatan kerja, minimnya peluang pendidikan, dan infrastruktur penunjang yang masih belum memadai menyebabkan masyarakat desa memilih hijrah ke daerah perkotaan dalam rangka mencari kesempatan kerja, dan peluang pendidikan yang lebih besar.

Fenomena kawasan permukiman kumuh, juga banyak ditemukan di kota Makassar. Tingkat kepadatan penduduk di kota Makassar, sangat tinggi. Dengan luas wilayah 199,26 km² (kilometer per segi) dan penduduk mencapai hampir 1,45 juta jiwa, menunjukkan tingginya kepadatan penduduk di Makassar. Padahal, standar ideal kepadatan penduduk adalah 500 jiwa/km² atau tiap jiwa mendapatkan ruang gerak 5 m² dalam bangunan. Hal ini menegaskan bahwa aspek urbanisasi dan angka kelahiran yang cukup tinggi, menjadi penyebab utama tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh di kota Makassar. Kenyataan ini tentu memberi implikasi terhadap upaya mencapai tujuan SDGs (*Sustainability Development Goals*) yang berorientasi pada upaya membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.

Dalam konteks regulasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Itulah sebabnya, permukiman kumuh merupakan produk dari pertumbuhan penduduk,

kemiskinan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan serta menyediakan pelayanan kota yang memadai. (Cahya & Juanda, 2012 dalam Nirwan Niswan Mungkasa, 2024).

Pemukiman kumuh juga identik dengan kawasan yang tidak memenuhi standar kualitas tempat tinggal yang layak, baik dari aspek infrastruktur, sanitasi, maupun kondisi sosial-ekonomi penghuninya. Pemukiman ini sering kali terletak di kawasan yang tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tempat hunian, seperti bantaran sungai, bawah jalan tol maupun daerah-daerah tempat pembuangan sampah (Yanuar, Kartini, and Akbar 2023). Selain itu, pemukiman kumuh memiliki karakteristik dengan kepadatan penduduk tinggi, dapat dilihat dari rumah-rumah yang dibangun secara berdempetan. Kemudian pemukiman kumuh juga memiliki tingkat Kesehatan yang rendah, hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit (Maharani, Wargadalem, and Safitri 2024).

Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Surabaya, Makassar dan masih banyak lagi kota besar lainnya tidak terlepas pada persoalan mengenai pemukiman kumuh. Makassar sebagai salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur juga masih di hadapkan dengan masih banyaknya kawasan-kawasan kumuh. Luas wilayah kumuh kota Makassar berdasar data tahun 2014 sebanyak 740,10 hektar (Ha) yang tersebar di 103 titik kelurahan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar No. 050/1341/Kep/05/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pemukiman Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, bahwa telah tercatat 103 kelurahan yang termasuk dalam Kawasan kumuh dari 143 kelurahan. Kemudian sebanyak 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga dari total penduduk kota Makassar yang menetap di Kawasan pemukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar dikategorikan ke dalam tiga tingkat keparahan: kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Permukiman dengan kategori kumuh berat tersebar di 37 kelurahan, sementara 49 kelurahan masuk dalam kategori kumuh sedang, dan 17 kelurahan tergolong kumuh ringan. (Rahayu and Jaharuddin 2020).

Implikasi sosiologis meningkatnya jumlah permukiman kawasan kumuh, tidak hanya memberi dampak terhadap penataan tata ruang perkotaan. Tetapi yang lebih mendasar, adalah berkembangnya penyakit sosial (patologi sosial) akibat dari pada kemiskinan yang menjadi potret umum kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan kumuh. Berbagai studi yang sudah dilaksanakan seperti studi yang

dilakukan Ulfah Utami dkk (2024), Irwan Rudianto dkk (2024), Iren Tumeang dkk (2023) dan Fathiyya Nabila dkk (2023), umumnya menyimpulkan bahwa aspek perilaku sosial juga sangat menentukan keberhasilan penataan kawasan kumuh. Karena itu, penataan permukiman kawasan kumuh tidak hanya dari sisi penataan lingkungan fisik saja tetapi yang lebih penting juga penataan atau rekayasa lingkungan sosialnya. Sebab selama ini, masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh menimbulkan sangat banyak masalah sosial baik sisi pendidikan, kesehatan maupun hukum (kriminalitas).

Sebenarnya kebijakan dan program pemerintah kota Makassar, untuk menata dan menangani kawasan permukiman kumuh, sudah berlangsung lama. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah banyak dilaksanakan, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Makassar. Seperti halnya program SLBM, USRI, PAMSIMAS, PNPM-MP, P2KP, NUSSP, PLPBK serta yang terbaru adalah program KOTAKU. Keseluruhan program tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Bahkan dalam visi, misi kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, telah banyak melahirkan kegiatan yang sifatnya aplikatif guna mendukung program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman (Nirman Niswan Mungkasa, 2024).

Namun masalahnya, penataan permukiman kawasan kumuh tidak berbarengan dengan penyiapan kualitas sumber daya manusia yang bermukim di lingkungan tersebut, sehingga berbagai penataan fisik yang dilakukan tetap saja menjadi masalah dalam hal menjaga dan mempertahankan kondisi fisik yang sudah dibangun oleh pemerintah. Itulah sebabnya, kondisi ini juga mempengaruhi indeks daya saing daerah (IDSD) kota Makassar yang walaupun skornya mencapai 3,91 di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70. Namun dalam pilar daya saing khususnya penataan infra struktur pointnya masih 2,64.

Oleh karena itu, banyak studi yang menjelaskan bahwa masalah yang paling krusial pada permukiman di kawasan kumuh adalah masalah perilaku sosial yang belum kondusif terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik mereka (masyarakat kumuh) seperti penataan infra struktur, perbaikan rumah dan lain-lain. Kondisi masyarakat yang dominan miskin, pendidikan yang relatif rendah, kesadaran kesehatan yang rendah dan kepedulian yang kurang untuk menjaga lingkungan fisik yang apik, asri, tenang dan nyaman menyebabkan berbagai intervensi

kebijakan dan program yang telah dilakukan pemerintah, belum memperlihatkan hasil yang optimal dan menggembirakan.

Dengan demikian, dalam menghadapi persoalan pemukiman kumuh yang terus berkembang di Kota Makassar, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku dan menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya kehidupan yang layak dan sehat. Perilaku masyarakat sangat berperan dalam menentukan keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di permukiman Kawasan kumuh.

Hal ini sejalan dengan visi, misi dan program Wakilota Makassar terpilih periode 2025-2030 pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham yaitu menjadikan Makassar kota yang nyaman, aman dan asri. Dalam visi walikota terpilih disebutkan menjadikan Makassar Maju, Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan. Bahkan dalam lima tahun ke depan, Makassar akan menjadi kota minim kemacetan dengan Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan menjadi kota yang tertata rapi, bersih dan Bahagia. Upaya untuk menata permukiman Kawasan kumuh di kota Makassar, juga sejalan dengan misi dan program yang disebut *Asta Cita Mulia* yang dalam misi dan program unggulan ke 8 (delapan) disebutkan mewujudkan kota yang Tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau. Salah satu program prioritasnya adalah penataan Kawasan permukiman kumuh.

Visi, misi walikota terpilih periode 2025-2030, sejalan dengan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, yang salah satu masalah yang menjadi perhatian dan termaktub dalam permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang didalamnya ada 3 instrumen utama yaitu; (1) masih rendahnya rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk; (2) masih tingginya persentase lingkungan permukiman kumuh dibandingkan dengan luas wilayah kota makassar, dan; (3) meningkatnya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Karena itu, penelitian ini berupaya untuk memetakan masalah-masalah sosial yang selama ini menjadi persoalan yang kurang mendukung penataan lingkungan di permukiman Kawasan kumuh. Selain itu, menggambarkan perilaku sosial masyarakat dalam hal sikap dan tindakan yang berkorelasi positif maupun negatif terhadap

penataan di kawasan kumuh. Begitu peran kelompok sosial dalam mengedukasi dan mengorganisir masyarakat di kawasan kumuh dan kebijakan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan perilaku pada masyarakat di perkumuhan Kawasan kumuh.

B. Pernyataan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian sosiologi, yang diorientasikan untuk menjawab pertanyaan pokoknya yaitu: Mengapa perilaku sosial selama ini belum berkontribusi positif dan optimal terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di permukiman Kawasan kumuh di kota Makassar? Untuk menguraikan masalah pokok tersebut, maka dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Masalah-masalah sosial apa saja yang dihadapi masyarakat yang bermukim di Kawasan kumuh?
2. Mengapa perilaku sosial (masyarakat) cenderung belum berkontribusi optimal dan maksimal terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk di permukiman Kawasan kumuh?
3. Bagaimana peran kelompok sosial dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya di permukiman Kawasan kumuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis dan menggambarkan perilaku sosial masyarakat di permukiman Kawasan kumuh kota Makassar yang selama ini belum berkontribusi optimal dan maksimal dalam upaya menjaga dan memelihara serta meningkatkan kualitas penataan lingkungan di Kawasan kumuh. Selain itu, menganalisis dan menggambarkan peranan kelompok sosial di masyarakat Kawasan kumuh dalam melakukan edukasi dan menjadi *agen* serta *channeling* yang menjembatani kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah kota.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara umum adalah sebagai bahan didalam perumusan kebijakan pada penataan permukiman Kawasan kumuh di Makassar. Sekaligus, sebagai wahana keilmuan untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut mengenai penataan Kawasan kumuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Masalah Sosial di Kota Makassar

Masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun nonfisik (Sakheraeni, 2012).

Raab dan Selznick (dalam Soetomo, 2010) menyatakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan manusia merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi dalam antar hubungan diantara warga masyarakat. Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh, bahwa masalah kekeringan pada dasarnya bukan masalah sosial, kondisi itu dapat menjadi masalah sosial apabila kemudian dapat mempengaruhi proses relasi. Suatu masalah yang dihadapi seseorang warga masyarakat sebagai individu tidak otomatis merupakan masalah sosial kalau kemudian berkembang menjadi isu sosial. Keterkaitan dengan proses relasi sosial seringkali juga menyangkut aturan dalam hubungan bersama baik formal maupun informal.

Menurut Parrillo (dalam Soetomo, 2010), masalah sosial mengandung empat komponen:

- a) Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
- b) Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c) Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d) Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari unsur-unsur tadi dapat dikatakan, bahwa agar dinyatakan sebagai masalah sosial, suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah sosial, pernyataan sebagai masalah sosial tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat pula secara simbolik. Suatu kondisi yang mendapat reaksi penolakan oleh masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai simbol pernyataan masyarakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah sosial. Oleh karena ada perbedaan referensi yang digunakan, mengakibatkan adanya perbedaan identifikasi dan defenisi dalam masyarakat yang berbeda.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2021, lebih dari 700 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dunia, dengan penghasilan kurang dari US\$1,90 per hari (Bank Dunia, 2021). Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan bervariasi, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang kurang stabil, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya dukungan sosial dan pemerintah (Suryawati, 2005). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi kemiskinan, termasuk program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan Pendidikan (Prawoto & Selatan, 2009).

Masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar cukup kompleks karena beragamnya kondisi sosial masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda-beda. Meskipun dikatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk mencegah kemiskinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati kesejahteraan, terkhusus untuk masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan diberbagai daerah semakin besar dari waktu ke waktu, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan *output* pengentasan kemiskinan (Ginting, 2019; Heitzmann & Matzinger, 2020; McWilliam, Wianti, & Taufik, 2021; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021).

Kemiskinan di Kota Makassar ini merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan. Menurut Soejono Soekanto peran

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, pada tahun 2023 Kota Makassar mengalami peningkatan penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 5.07%.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Makassar

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Jumlah Penduduk Miskin (000)	65,12	69,98	74,69	71,83	80,32
Persentase Penduduk Miskin	4,28	4,54	4,82	4,58	5,07

Sumber: BPS Kota Makassar (2023)

Secara absolut jumlah penduduk miskin naik pada periode 2023 sebesar 8,49 ribu jiwa, yaitu dari 71,83 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 80,32 ribu jiwa tahun 2023. Secara persentase, penduduk miskin di Kota Makassar juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 4,58 persen di tahun 2022 menjadi 5,07 persen di tahun 2023.

2. Tinjauan tentang Kawasan Kumuh dalam Perspektif Sosiologi

Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Menurut Najib (2005), kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan di mana pun juga, kata kumuh tetap menjurus kepada sesuatu hal yang bersifat negatif. Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari:

1. Sebab Kumuh

- a. Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara.
- b. Segi masyarakat atau sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

2. Akibat Kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain:

- a. Kondisi Perumahan yang buruk
- b. Penduduk yang terlalu padat
- c. Fasilitas yang kurang memadai
- d. Tingkah laku menyimpang
- e. Budaya kumuh

Pemukiman kumuh atau kawasan kumuh merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak layak huni. Bangunan maupun sarana-prasarana yang tersedia tidak memenuhi standar yang berlaku, baik terkait kebutuhan dasar, kepadatan hunian, persyaratan rumah sehat, ketersediaan air bersih, sanitasi, maupun infrastruktur pendukung seperti jalan, ruang terbuka, dan fasilitas sosial lainnya (Najib, 2005). Kawasan semacam ini umumnya identik dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, kawasan kumuh sering memunculkan persoalan sosial, seperti tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi minuman keras. Di banyak daerah, kondisi tidak higienis di kawasan kumuh juga menjadikannya sebagai pusat munculnya berbagai masalah kesehatan (Lestari et al., 2013).

Berdasarkan pandangan kedua ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi yang umumnya berada di wilayah perkotaan. Kawasan ini tidak layak dijadikan tempat tinggal karena berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, serta memiliki kerentanan tinggi terhadap munculnya perilaku menyimpang.

• **Ciri-ciri Kawasan Kumuh**

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya.

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor formal.

- **Faktor Penyebab Kawasan Kumuh**

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Suparlan (1997) adalah:

1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat di antara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota.

2. Faktor Bencana

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat. Secara umum, penyebab munculnya kumuh dapat berasal dari kondisi fisik dan non fisik penduduk bersangkutan. Kondisi fisik secara jelas dapat

dilihat dari kondisi lingkungan penduduk yang rendah serta status kepemilikan lahan yang ilegal, sedangkan non fisik yaitu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan budaya penduduk tersebut.

Secara sosiologis, salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh adalah kemiskinan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan di pedesaan mengakibatkan mereka memilih untuk berurbanisasi. Namun, minimnya skill dan rendahnya pendidikan sebagian besar pelaku urbanisasi tersebut justru menyebabkan mereka tidak terserap ke dalam lapangan pekerjaan di kota. Hal ini, justru menambah kemiskinan baru di kota. Sedangkan di wilayah perkotaan, kemiskinan mengakibatkan sebagian masyarakat kota tidak mampu untuk memiliki hunian layak sesuai standar di lingkungan yang baik mengakibatkan mereka memilih tinggal di rumah-rumah tidak layak huni dengan berbagai resiko.

Menurut John Friedman, kemiskinan adalah kondisi di mana individu tidak mampu mengakuisisi basis kekuatan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah modal produktif atas aset, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik, serta jaringan sosial (Suyanto, 2001). Munculnya permukiman kumuh di Kota Makassar, diakibatkan oleh ketidakmampuan penghuninya dalam mengakses basis kekuatan sosial tersebut.

3. Tinjauan tentang Perilaku Sosial

Secara umum, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya (Notoadmodjo, Soekidjo, 2012). Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku sosial memusatkan perhatian pada tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Tingkah laku individu dalam kehidupan bersama selalu berdasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu (Wirawan, 2015).

Budiman Didin (2001) mendefinisikan Perilaku sosial adalah suasana saling membutuhkan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri-pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Ada

ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan yang lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dan berada dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) dalam Rusli Ibrahim (2001) menjelaskan perilaku sosial seseorang tampak dalam pola respons antar orang, yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi.

Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain (Baron & Byrne, 1991). Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Sesungguhnya yang menjadi dasar dari uraian di atas adalah bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial (W.A. Gerungan, 1978:28). Sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi sosial diantara manusia dapat merealisasikan kehidupannya secara individual. Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

4. Tinjauan tentang Kelompok Sosial

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Menurut Macleaver & Charles H. Page (1957), kelompok adalah himpunan atau kesatuan- kesatuan manusia yang hidup bersama, yang bersifat mempengaruhi dan saling menolong. Dalam Soerjono Soekanto (1983), kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan diantara mereka

secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Selanjutnya Mayor Polak (1985), memperjelas kondisi kelompok dengan sejumlah orang yang saling berhubungan dalam struktur. Menurut Robert K. Merton (1967), sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan.

Kedekatan, Pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi.

Kesamaan, Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelegensi, atau karakter-karakter personal lain.

Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok. Sampai seberapa jauh salah seorang anggota kelompok dapat ikut serta dalam penerimaan bersama suatu peraturan, dibatasi oleh tiga syarat : ia harus mengetahui adanya peraturan ini, dalam arti melihat orang-orang lain menerimanya ; ia sendiri harus menerimanya ; dan kedua-duanya, baik ia sendiri maupun orang lain, harus mengakui bahwa semua menerimanya (Newcomb,dkk 1981).

B. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
Riska Damayanti, Muh. Ansyari Syamsuddin, & Muh. Alfacmy Nurawal (2020).	Identifikasi Permukiman Kumuh: Studi Kasus Kawasan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh Pannampu tergolong dalam kategori kumuh berat. Identifikasi dilakukan pada aspek kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Kondisi bangunan sangat padat dan tidak teratur, drainase buruk, limbah dibuang langsung ke saluran, serta tidak ada proteksi kebakaran
Ulfa Utami Mapped, Umy Qalzum Hafid, & Riri Amandaria (2024)	Permukiman Kumuh di Kota Makassar: Sebuah Tinjauan Sosiologis.	Penelitian pustaka ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Kota Makassar masih tinggal di kawasan kumuh. Persoalan utama adalah kemiskinan, dengan faktor penyebab meliputi urbanisasi, keterbatasan lahan, minimnya sarana prasarana dasar, rendahnya pendidikan dan keterampilan, serta lemahnya akses pada basis kekuatan sosial. Penyelesaian persoalan kumuh harus ditempuh melalui pemerataan akses pada sumber daya sosial
Raudatul Jannah Lahya, Mappamiring, & Ahmad Harakan (2024)	Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Makassar.	Hasil penelitian di Kelurahan Maccini Sombala menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh belum berjalan efektif. Pemberian bantuan sembako dan bahan bangunan dinilai tidak signifikan dalam mengurangi kekumuhan. Sosialisasi terkait kebersihan lingkungan juga tidak terlaksana, meskipun terdapat

		kunjungan langsung dari pihak pemerintah. Berdasarkan kerangka teori Richard M. Steers (pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi), penanganan yang ada masih lemah pada aspek integrasi dan pencapaian tujuan
--	--	---

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar penelitian mengenai kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar masih berfokus pada aspek fisik, kemiskinan, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Damayanti et al. (2020) menekankan pada identifikasi kondisi fisik kawasan kumuh seperti bangunan, drainase, persampahan, dan proteksi kebakaran, sementara Mapped et al. (2024) lebih menyoroti faktor kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya kawasan kumuh dengan menggunakan analisis teori kemiskinan John Friedman. Adapun Lahya et al. (2024) menilai efektivitas penanganan kawasan kumuh dari sudut pandang strategi pemerintah melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, namun belum banyak menyinggung keterlibatan langsung masyarakat. Dengan demikian, dapat dilihat adanya celah penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik mengulas peran dan pemanfaatan kelompok sosial dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh. Padahal, modal sosial dan peran kelembagaan lokal berpotensi besar dalam mendorong kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat resiliensi sosial masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pemanfaatan kelompok sosial dalam pemberdayaan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar tahun 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Metode penelitian merupakan hal yang penting dirumuskan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Bab ini akan membahas Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis pemanfaatan kelompok sosial dalam pemberdayaan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami dinamika kebijakan, implementasi program, serta peran kelembagaan dan masyarakat dalam proses pemberdayaan kawasan kumuh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan berfokus pada 3 kecamatan berdasarkan data Kawasan kumuh dari BPS kota makassar tahun 2025, yaitu Kecamatan Tallo, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Mariso. Waktu penelitian dijadwalkan berlangsung mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2025.

B. Sumber Data

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menurut Sugiyono (2019), merupakan teknik penentuan informan dengan sengaja karena kriteria tertentu. Pemilihan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan juga permasalahan yang sedang diteliti. Dalam teknis ini juga, siapa yang akan menjadi informan diserahkan pada pertimbangan peneliti yang menurutnya sesuai dengan dan tujuan penelitian.

Informan penelitian dikategorisasi kedalam 2 (dua) kelompok informan yaitu informan berdasarkan pada wawancara mendalam dan informan yang digunakan pada *Focus Group Discussion* (FGD), dimana kedua informan ini berbeda namun saling mendukung didalam upaya memperoleh data dan informasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian ini. Menyangkut tentang informan wawancara mendalam (*in depth interview*), ditentukan berdasar kriteria ditetapkan sebelumnya,

yaitu; (1) warga masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh, dan; (2) tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Sedangkan informan atau narasumber dalam FGD berasal dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan kepada informan. Wawancara mendalam ini digunakan sebagai sumber data primer yang diramu dalam hasil penelitian

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen– dokumen seperti surat–menyurat, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Dokumentasi yang digunakan sebagai data berasal dari data sekunder yang telah dijabarkan pada sumber data sekunder.

3. Observasi (pengamatan)

Pengamatan digunakan untuk untuk mendapatkan data–data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan.

4. *Focus Grup Discussion* (FGD),

FGD ini dilakukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dengan melalui kuesioner, terutama yang berkaitan dengan masalah dan solusi yang dapat dilakukan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan–catatan tertulis lapangan. Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal–hal pokok, difokuskan pada hal–hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

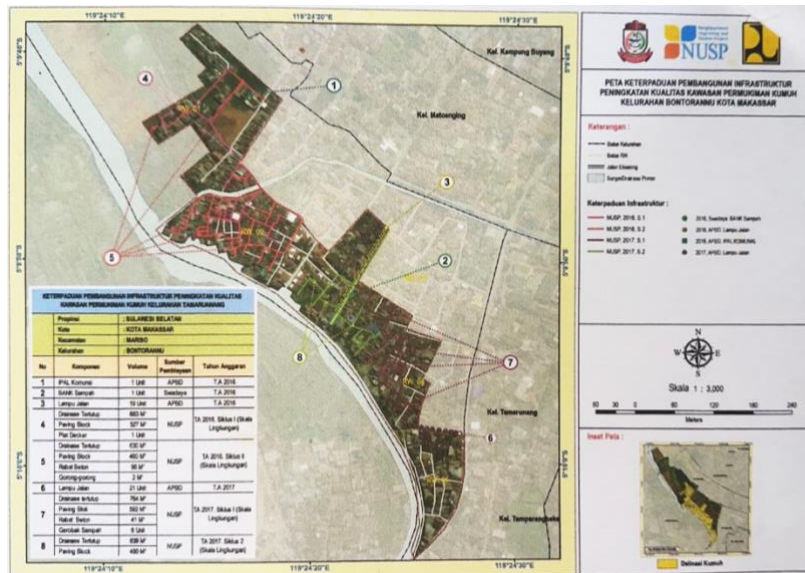
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

a. Kelurahan Bontorannu

Kelurahan Bontorannu merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang memiliki sejarah geografis dan sosial yang cukup unik. Secara historis, kawasan ini terbentuk dari endapan pasir dan lumpur yang terbawa aliran Sungai Jeneberang menuju Selat Makassar. Endapan tersebut menciptakan daratan baru berbentuk delta yang oleh masyarakat setempat disebut *bonto*, yaitu gundukan atau daratan pasir yang muncul secara alami. Dari karakter geografis inilah muncul nama “Bontorannu,” yang terdiri dari kata *bonto* (daratan pasir) dan *rannu* (bersenang-senang). Penamaan ini mencerminkan identitas awal wilayah tersebut sebagai ruang terbuka yang menjadi tempat warga berkumpul, beraktivitas, dan menikmati kawasan pesisir. Dalam ingatan masyarakat, kawasan ini dahulu dipahami sebagai daerah yang menyenangkan dan menjadi titik interaksi sosial yang penting, terutama pada masa ketika pesisir Makassar masih didominasi oleh aktivitas nelayan dan hubungan masyarakat dengan laut sangat kuat.

Gambar 4.1 Peta Kawasan Kelurahan Bontorannu



(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Bontorannu)

Secara geografis, Kelurahan Bontorannu memiliki luas wilayah sekitar 0,18 km², menjadikannya salah satu kelurahan berukuran kecil di Kota Makassar. Batas-batas

wilayahnya meliputi Kelurahan Mattoangin di sebelah utara, Kelurahan Maccini Sombala di sebelah selatan, serta Kelurahan Tamarunang di sebelah timur, sementara bagian barat-laut wilayah ini langsung berbatasan dengan kawasan pesisir Selat Makassar. Posisi geografis yang strategis di wilayah pesisir membuat Bontorannu mengalami dinamika ruang yang cepat, terutama akibat perkembangan perkotaan, penyempitan ruang terbuka, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Karakter sebagai wilayah pesisir-delta turut memengaruhi pola permukiman dan penggunaan ruang, misalnya pemukiman padat yang tumbuh di atas lahan terbatas, adaptasi masyarakat terhadap banjir rob, serta ketergantungan pada aktivitas informal yang berkembang di sekitar pesisir.

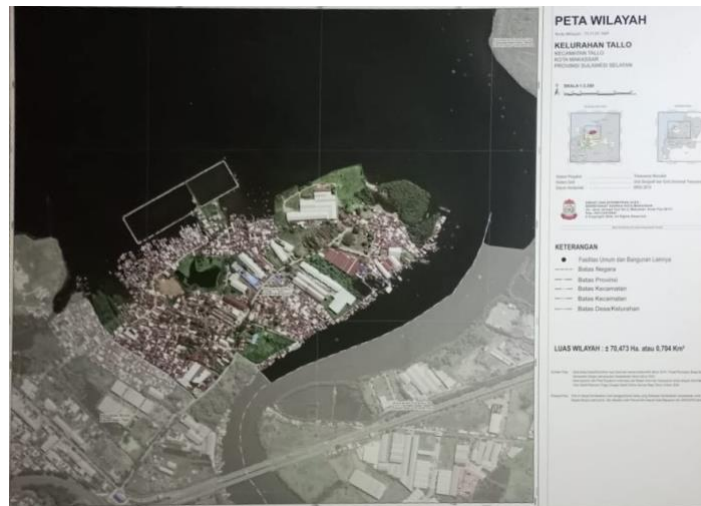
Dari sisi demografi, Kelurahan Bontorannu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (CAPIL) tahun 2023, jumlah penduduk kelurahan ini mencapai sekitar 6.175 jiwa, terdiri dari 3.116 laki-laki dan 3.059 perempuan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019 yang menunjukkan populasi sebesar 6.187 jiwa, dinamika jumlah penduduk Bontorannu cenderung stabil, menunjukkan bahwa migrasi masuk-keluar wilayah ini tidak mengalami perubahan drastis. Namun, dalam konteks luas wilayah yang kecil, kepadatan penduduk tersebut menunjukkan tekanan yang cukup signifikan terhadap ruang hidup dan fasilitas sosial. Data lain menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 842 rumah yang tercatat secara administratif, menegaskan gambaran mengenai permukiman padat khas wilayah perkotaan pesisir.

b. Kelurahan Tallo

Kelurahan Tallo merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang memiliki nilai historis dan kultural yang sangat kuat. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari bekas Kerajaan Tallo, salah satu kerajaan besar di pesisir Makassar pada abad ke-16 hingga ke-17 yang berperan penting dalam perkembangan politik, pelayaran, dan perdagangan di kawasan tersebut. Jejak kekuasaan kerajaan masih dapat ditemui hingga kini, terutama melalui keberadaan Kompleks Makam Raja-Raja Tallo yang dibangun sekitar abad ke-17 dan menjadi lokasi pemakaman para raja serta bangsawan hingga abad ke-19. Kompleks ini dahulu berada di dalam kawasan benteng Tallo sebelum kemudian dipugar kembali oleh pemerintah pada tahun 1974–1975 dan 1981–1982 untuk menjaga bentuk dan struktur sejarahnya. Selain itu, sejumlah kampung lama seperti Pallantikang, Mangarabombang, Limbangan Toayya, Agang Pancayya, Balang Kiti, dan Bastion

Karabbaka masih menyimpan penamaan tradisional yang mencerminkan fungsi sosial dan struktur ruang pada masa kerajaan, mulai dari tempat penobatan raja, kawasan pesisir, lokasi pengawasan, hingga pemukiman bangsawan. Jejak-jejak toponim ini memperlihatkan bagaimana pola permukiman terdahulu masih memengaruhi identitas ruang dan memori kolektif masyarakat Tallo hingga sekarang.

Gambar 4.2 Peta Kawasan Kelurahan Tallo



(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tallo)

Secara geografis, Kelurahan Tallo terletak di bagian utara Kota Makassar dengan luas sekitar 0,61 km² dan berada di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan muara menuju Selat Makassar. Letak ini menjadikan Tallo sebagai wilayah yang sejak dahulu memiliki hubungan erat dengan aktivitas pelayaran, pesisir, dan perdagangan. Pada masa lalu, Tallo dikenal sebagai pusat kerajinan kayu serta lokasi galangan kapal tradisional (*boat-building*) yang memanfaatkan akses langsung ke laut dan sungai. Secara administratif, wilayah ini terbagi ke dalam beberapa RW dan RT dengan karakter permukiman yang padat sebagai konsekuensi perkembangan kota dan keterbatasan ruang. Berdasarkan data profil wilayah, penduduk Kelurahan Tallo berjumlah sekitar 8.017 jiwa dengan lebih dari dua ribu kepala keluarga, menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Kondisi ini memperlihatkan dinamika sosial masyarakat perkotaan yang terus berkembang, ditandai oleh meningkatnya kebutuhan ruang permukiman, infrastruktur, serta layanan sosial dasar.

Sejarah yang panjang dan transformasi ruang yang cepat menjadikan Kelurahan Tallo sebagai lokasi penelitian yang penting untuk memahami interaksi antara warisan budaya, perubahan sosial, dan tekanan urbanisasi. Tallo bukan hanya ruang administratif perkotaan, tetapi juga kawasan yang memadukan identitas historis dari

masa kerajaan dengan karakter kontemporer sebagai permukiman padat di kota besar. Nilai-nilai kultural, struktur kampung lama, serta keberadaan situs sejarah menegaskan bahwa masyarakat Tallo hidup dalam lanskap sosial yang memuat memori panjang, sekaligus berada dalam dinamika perubahan ruang yang terus berlangsung. Konteks inilah yang menjadikan Tallo sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika sosial, kebijakan pembangunan, serta praktik kehidupan masyarakat dalam ruang perkotaan pesisir.

2. Kondisi Kawasan Pemukiman

a. Kelurahan Bontorannu

Kondisi permukiman di Kelurahan Bontorannu menunjukkan karakter kawasan padat penduduk dengan ruang fisik yang sangat terbatas. Saat turun langsung ke lapangan, terlihat bahwa rumah-rumah warga berdiri saling berdempetan tanpa jarak yang memadai, membentuk deretan bangunan yang menutup hampir seluruh ruang terbuka. Jalanan di dalam lorong-lorong permukiman sangat sempit, sebagian bahkan memiliki lebar kurang dari satu meter, sehingga hanya dapat dilalui oleh satu orang pada satu waktu. Kepadatan ini semakin terasa karena sebagian besar rumah tidak memiliki pekarangan, dan dalam satu unit rumah dapat dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga, yang menggambarkan tekanan terhadap kebutuhan ruang dan tingginya konsentrasi penduduk di wilayah ini.

Gambar 4.3 Kondisi Kawasan Pemukiman Kelurahan Bontorannu



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan juga menjadi tantangan utama. Di banyak titik, sampah terlihat berserakan di sepanjang lorong maupun di sekitar hunian warga, sementara saluran air tidak berfungsi optimal akibat penyumbatan dan minimnya pengelolaan lingkungan. Situasi ini menyebabkan genangan air kerap

muncul ketika hujan, memperburuk kualitas lingkungan dan memicu bau tidak sedap. Letak geografis Bontorannu yang berada di sekitar kanal membuat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan. Namun, kedekatan dengan kanal tersebut juga menjadikan kawasan rentan terhadap penumpukan sampah, sedimentasi, serta luapan air, yang pada akhirnya memperparah kondisi kumuh permukiman.

Secara keseluruhan, gambaran permukiman Bontorannu mencerminkan tantangan perkotaan yang dihadapi masyarakat pesisir dengan ruang terbatas, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta kepadatan hunian yang tinggi. Kombinasi antara keterbatasan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan lemahnya sistem pengelolaan lingkungan menjadikan kawasan ini berkembang secara tidak teratur dan memunculkan persoalan ekologis serta kesehatan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius.

b. Kelurahan Tallo

Kondisi kawasan permukiman di Kelurahan Tallo menggambarkan dinamika khas wilayah pesisir yang berada di pinggiran laut, dengan berbagai persoalan sosial-ekologis yang saling terkait. Secara geografis, sebagian besar kawasan ini berada di tepi perairan, sehingga pola permukiman yang berkembang mengikuti karakteristik masyarakat nelayan. Banyak warga tinggal di atas tanah yang bukan merupakan hak milik, melainkan lahan negara atau wilayah pesisir yang ditempati secara turun-temurun. Hal ini membuat pola hunian di Tallo tumbuh secara organik tanpa perencanaan tata ruang yang jelas, sehingga menciptakan permukiman padat dan rapat antar rumah. Rumah-rumah panggung menjadi bentuk bangunan yang paling dominan, baik sebagai adaptasi terhadap kondisi pasang-surut air laut maupun sebagai tradisi masyarakat pesisir. Namun, konstruksi rumah yang sederhana dan saling berhimpitan membuat kualitas lingkungan permukiman jauh dari layak.

Gambar 4.4 Kondisi Kawasan Pemukiman Kelurahan Tallo



Sumber: Dokumentasi Lapangan

Salah satu persoalan yang paling mencolok adalah kondisi sanitasi. Sebagian besar warga tidak memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan. Limbah domestik dibuang langsung ke bawah rumah, dan praktik ini semakin memperburuk kondisi lingkungan. Ketika air laut surut, kolong rumah menjadi kering, sehingga limbah yang menumpuk mengeluarkan bau menyengat dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Di saat pasang, air kembali menggenangi area tersebut, mengangkut limbah ke perairan sekitar dan memperburuk pencemaran. Selain itu, ketiadaan fasilitas penampungan sampah membuat sampah rumah tangga berserakan di berbagai sudut permukiman. Warga tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang teratur, sehingga tumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari dan memicu masalah kesehatan serta pencemaran yang lebih luas.

Meski jalan utama di kawasan ini relatif lebih lebar sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, kondisi lorong-lorong di dalam permukiman tetap sempit dan tidak teratur. Kepadatan bangunan menciptakan ruang gerak yang terbatas, baik bagi aktivitas sosial warga maupun upaya penanganan darurat. Kepadatan ini juga mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor nonformal. Mayoritas penduduk Kelurahan Tallo menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai nelayan, buruh informal, atau pekerja serabutan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak stabil dan cenderung rendah. Keterbatasan ekonomi ini berdampak langsung pada kemampuan warga untuk memperbaiki kualitas hunian maupun lingkungan sekitar.

Di tengah kondisi lingkungan yang berat, akses terhadap air bersih menjadi persoalan mendasar lainnya. Meskipun tinggal di bantaran sungai, warga justru

kesulitan mendapatkan air yang layak konsumsi. Sungai di sekitar permukiman telah tercemar oleh limbah rumah tangga dan aktivitas masyarakat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber air bersih. Warga bergantung pada sumber air yang harus dibeli atau diperoleh dari fasilitas umum yang terbatas, yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan harian. Secara keseluruhan, gambaran permukiman di Kelurahan Tallo menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir, yang mencakup persoalan sanitasi, kepemilikan lahan, kepadatan hunian, akses air bersih, serta kerentanan sosial ekonomi yang saling berkaitan.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Masalah Sosial di Kawasan Kumuh

Kehidupan masyarakat di kawasan kumuh Kota Makassar mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial perkotaan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di balik keterbatasan fisik permukiman yang padat dan kurang layak, tersimpan berbagai problematika sosial yang dialami warga sehari-hari. Penelitian ini mengungkap realitas kehidupan masyarakat kawasan kumuh melalui pengamatan langsung di lapangan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kondisi lingkungan yang buruk, tetapi juga mengalami berbagai tekanan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan masa depan mereka. Temuan lapangan mengidentifikasi beberapa masalah sosial utama yang menjadi karakteristik kehidupan di kawasan kumuh, diantaranya:

a) Konflik dan Kriminalitas

Salah satu masalah sosial yang paling menonjol di kawasan kumuh adalah tingginya angka konflik antarwarga dan tindak kriminalitas. Kondisi lingkungan yang padat, keterbatasan ekonomi, serta minimnya pengawasan sosial menciptakan kondisi yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa konflik sosial dan aktivitas kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga tindak kekerasan menjadi fenomena yang kerap terjadi di kawasan ini. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu NL selaku salah satu ketua RT yang ada di Kelurahan Tallo, beliau menyatakan:

“.....disini itu biasa takut takut ki menegur karena nanti tersinggung ki, karena rawan sekali disini dek itu orang baku bombek bombek karena tersinggung, biasa juga kalau ditegur mi sedikit na baleki jki jadi biarkan mi saja deh.....”

Masih di Kelurahan Tallo, Ibu AS menyatakan:

“.....jangan mki bilang dek, disini itu anak anak muda suka ki juga perang perang, biasa berkelahi mi sama anak dari lorong lain baru sampai mi disini biasa baku berkelahi, biasa juga para para dia ji nanti baku berkelahi.....”

Agak berbeda dengan Kelurahan Tallo, Pak AD selaku salah satu ketua RW di Kelurahan Bontorannu menyatakan:

“.....jangan mki dek anak anak muda disini itu banyak sekali pemakai, yang seperti itu karena keturunan Bapaknya yang pakai anaknya juga ikut tommy, itumi suka juga biasa pergi mencuri mencuri, tapi kalau berkelahi berkelahi jarang ji iya disini.....”

Berdasarkan ketiga pernyataan informan di atas, tampak bahwa konflik dan kriminalitas di kawasan kumuh memiliki karakteristik yang beragam namun sama-sama mengkhawatirkan. Di Kelurahan Tallo, permasalahan yang dominan adalah tingginya sensitivitas warga terhadap teguran yang berujung pada konflik fisik, serta maraknya tawuran antarkelompok pemuda dari lorong berbeda. Kondisi ini menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan warga, bahkan tokoh masyarakat seperti ketua RT merasa kesulitan untuk menegakkan norma sosial karena khawatir memicu perselisihan yang lebih besar. Sementara itu, di Kelurahan Bontorannu, masalah kriminalitas lebih didominasi oleh penyalahgunaan narkoba yang bersifat turun-temurun dalam keluarga, yang kemudian memicu tindak kejahatan seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau membeli narkoba. Meskipun konflik fisik antarwarga relatif jarang terjadi di Bontorannu, namun penyalahgunaan narkoba dan kejahatan properti menjadi ancaman serius bagi keamanan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kawasan kumuh tidak hanya menghadapi satu jenis masalah kriminalitas, melainkan kombinasi antara konflik sosial, kekerasan antarkelompok, dan kejahatan terkait narkoba yang saling terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b) Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan menjadi akar permasalahan yang dihadapi sebagian besar masyarakat di kawasan kumuh. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan modal usaha membuat warga sulit mendapatkan pekerjaan layak dengan penghasilan memadai. Tingkat pengangguran yang tinggi dan pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu menjadi realitas sehari-hari yang harus dihadapi. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa kondisi ekonomi

masyarakat sangat memprihatinkan dan menjadi sumber tekanan psikologis bagi kepala keluarga. Seperti yang dikatakan Ibu SL, salah satu warga di Kelurahan Bontorannu yang menyatakan:

“.....rata-rata warga disini itu kerjanya serabutan dek, kadang jadi ki nelayan kadang juga jadi ki tukang batu, tidak tetap sembarang ji kodong na kerja yang jelas bisa makan toh.....”

Pernyataan Ibu SL menggambarkan ketidakpastian ekonomi yang dialami warga kawasan kumuh, di mana mereka harus bergantung pada pekerjaan informal yang tidak menentu. Ketiadaan jaminan pendapatan tetap membuat mereka hidup dalam kondisi subsisten, hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tanpa kemampuan untuk menabung atau merencanakan masa depan yang lebih baik.

Senada dengan yang dikatakan Ibu SL, Pak AD mempertegas dengan menyatakan:

“.....disini rata-rata sekolah ji sampai SMA tapi sekarang susah sekali dapat kerja dek, mau juga kodong buka buka usaha tidak ada modalnya, jadi sembarang mami na kerja.....”

Pak AD mengungkapkan paradoks yang dihadapi warga berpendidikan menengah di kawasan kumuh. Meskipun telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan formal karena keterbatasan keterampilan spesifik dan jaringan sosial yang diperlukan di pasar kerja. Keinginan untuk berwirausaha pun terhambat oleh minimnya akses terhadap modal usaha, sehingga pilihan yang tersisa hanyalah menerima pekerjaan apa adanya tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan pendidikan atau minat mereka.

Kondisi kemiskinan yang ada di Kelurahan Bontorannu, diceritakan oleh ibu ML salah satu Ketua RT di Kelurahan Bontorannu yang menyatakan:

“.....disini dek hampir 70% warga itu penerima bantuan, karena memang masih masukki toh data orang miskin, rata-rata juga bekerja tidak kantoran kodong, tukang batu ji atau nelayan biasa juga untuk makan susah mi itumi kasih tergantung sekali kodong sama bantuan, karena kan beda beda itu bantuan yang ada disini, ada PKH ada juga sembako.....”

Ibu ML memberikan gambaran sistemik tentang kemiskinan struktural di kawasan kumuh, di mana mayoritas warga bergantung pada program bantuan sosial pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Angka 70% penerima

bantuan menunjukkan bahwa kemiskinan bukan kasus individual melainkan kondisi kolektif yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Ketergantungan pada bantuan PKH dan sembako mengindikasikan bahwa pendapatan dari pekerjaan informal seperti tukang batu atau nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sehingga warga membutuhkan subsidi pemerintah sebagai penopang kehidupan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Tallo, seperti yang dijelaskan oleh Ibu AS salah satu Ketua RT di Kelurahan Tallo yang menyatakan:

“.....rata-rata warga ku disini dek buruh harian kodong, ada juga ji nelayan, itumi juga disini penerima bantuan toh rata-rata karena untuk makan juga susah kodong....”

Pernyataan Ibu AS mengkonfirmasi bahwa pola kemiskinan di Kelurahan Tallo tidak berbeda dengan Kelurahan Bontorannu. Dominasi pekerjaan sebagai buruh harian dan nelayan menunjukkan keterbatasan pilihan mata pencaharian di kawasan kumuh. Frasa "untuk makan juga susah" menegaskan bahwa warga berada dalam kondisi kemiskinan absolut, di mana bahkan kebutuhan paling dasar sulit dipenuhi tanpa bantuan eksternal.

Dari Gambaran kondisi kemiskinan ini ada cerita berbeda yang nyatakan oleh Pak AD:

“....jadi ini toh dek, mereka terdaftar sebagai penerima bantuan tapi motornya NMAX jadi saya juga bingung ini kalau dilihat ki gaya sekali tapi kalau masalah mendata mi untuk menerima bantuan dia mi nomor satu maju....”

Pernyataan Pak AD mengungkap fenomena penyalahgunaan sistem bantuan sosial yang terjadi di tengah kemiskinan massal. Adanya oknum yang tidak layak menerima bantuan namun tetap terdaftar sebagai penerima menunjukkan kelemahan dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, di mana mereka yang benar-benar membutuhkan harus berbagi sumber daya terbatas dengan mereka yang memanipulasi sistem. Fenomena ini juga mengindikasikan adanya perbedaan persepsi tentang kemiskinan antara indikator formal (kepemilikan aset) dengan kondisi ekonomi sebenarnya, atau kemungkinan adanya praktik manipulasi data kemiskinan.

Secara keseluruhan, fenomena kemiskinan di kawasan kumuh menunjukkan kompleksitas yang melibatkan aspek struktural, ekonomi, dan sosial. Mayoritas warga terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang dimulai dari keterbatasan

pendidikan dan keterampilan, berlanjut pada ketiadaan akses terhadap pekerjaan formal dan modal usaha, serta berujung pada ketergantungan terhadap pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu. Kondisi ini membuat sebagian besar warga bergantung pada program bantuan sosial pemerintah sebagai penopang kehidupan. Namun, sistem bantuan sosial yang ada masih memiliki kelemahan dalam hal pendataan dan targetting, sehingga tidak seluruh bantuan tepat sasaran. Kemiskinan di kawasan kumuh bukan sekadar masalah rendahnya pendapatan, melainkan ketidakmampuan sistematis untuk keluar dari kondisi tersebut akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang mobilitas sosial. Ketergantungan pada pekerjaan serabutan dan bantuan sosial mencerminkan kerapuhan ekonomi masyarakat yang rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi atau krisis.

c) Masalah Infrastruktur Dasar

Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi ciri khas kawasan kumuh yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup penghuninya. Sistem drainase yang buruk, pengelolaan sampah yang tidak terorganisir, jalan lingkungan yang sempit dan rusak, serta keterbatasan akses air bersih merupakan persoalan yang dihadapi warga setiap hari. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berikut paparan dari Ibu AS terkait kondisi infrastruktur di lingkungan Kelurahan Tallo:

“.....disini sampah dek tidak ada penampungannya, jadi dibuang saja ditanah kosong, baru itu juga mobil pengangkut sampah jarang ki datang, jadi menumpuk sekali mi itu sampah baru datangi, itumi juga kasih rantasa dilihat dipinggir jalan toh karena begitu mi kurang terjadwal ki mobil sampah datang.....”

Ibu SP salah satu warga Kelurahan Tallo juga menyatakan hal senada:

“.....jauh sekali dek tempat buang sampah jadi sembarang mi dibuang biar dibawah rumah kubuang tommi, karena kalau didepan juga disimpan sama ji tidak ada yang angkat ki jadi mending langsung mi saja kita buang dibawah.....”

Kedua pernyataan informan di atas menggambarkan kegagalan sistem pengelolaan sampah di kawasan kumuh yang memaksa warga mengembangkan praktik pembuangan sampah yang tidak sehat. Ketiadaan tempat penampungan sampah (TPS) yang memadai, jarak yang jauh ke lokasi pembuangan, serta ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah telah mendorong warga

membuang sampah sembarangan, baik di lahan kosong maupun langsung di bawah rumah mereka. Kondisi ini menciptakan penumpukan sampah yang tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit dan pencemaran. Praktik pembuangan sampah yang dilakukan warga, meskipun dipahami sebagai solusi pragmatis atas keterbatasan infrastruktur, justru memperburuk kondisi kesehatan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kawasan kumuh belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan dasar pengelolaan kebersihan kota, sehingga warga tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan cara-cara yang merugikan kesehatan dan lingkungan mereka sendiri.

Masalah serupa terjadi juga di Kelurahan Bontorannu, sesuai dengan yang dikatakan Ibu SL yang menyatakan:

“.....jauh sekali dek kalau mauki buang sampah jadi saya biasa di Sungai mami kubuang karena langsung ji toh jadi ndk capek mki jalan ka orang orang lain juga disitu semua ji buang....”

Ibu ML selaku ketua RT membenarkan pernyataan Ibu SL dengan mengatakan:

“.....memang dek warga itu malas mi buang sampah, dulu sebenarnya ada tukang sampah gerobak itu yang tiap sore datang mi ambil semua sampah-sampah tapi berhenti mi, karena Pak Wali bilang gratis iuran sampah untuk orang miskin, na tidak mungkin mi tawwa ini yang tukang sampah mau ambil ambil sampah baru tidak dibayarki na warga juga tidak adami mau bayar iuran sampahnya....”

Kedua pernyataan ini mengungkap permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Bontorannu yang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga oleh hambatan dalam implementasi kebijakan dan perubahan perilaku warga. Jarak yang jauh ke tempat pembuangan sampah mendorong warga memilih membuang sampah langsung ke sungai sebagai solusi praktis, yang pada akhirnya mencemari sumber air dan lingkungan. Di sisi lain, terdapat kebuntuan dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Pembebasan iuran sampah untuk warga miskin, meskipun bertujuan baik, justru menghentikan layanan pengangkutan sampah swadaya yang sebelumnya berjalan, karena petugas tidak mendapat imbalan sementara warga juga tidak bersedia membayar dengan alasan telah mendapat pembebasan biaya. Kondisi ini menciptakan situasi di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah,

sehingga sungai menjadi tempat pembuangan massal yang merusak ekosistem dan menciptakan risiko kesehatan bagi masyarakat hilir.

Masalah lain yang dihadapi oleh warga di Kelurahan Bontorannu adalah permasalahan aliran draise yang buruk, hal ini dijelaskan oleh Daeng NG, yang menyatakan bahwa:

“.....karena banyak warga disini yang buang sampah disungai jadi itu aliran air kan tersumbat ki, jadi kalau hujan lewat itu pipa pipa yang kita lihat dijalan jalan naik itu air kodong jadi biasa itu kita masuk air dirumah, sebenarnya penyebabnya lagi lagi karena buang sampah sembarangan ji ini.....”

Pernyataan Daeng NG mengungkap hubungan kausalitas antara perilaku pembuangan sampah sembarangan dengan permasalahan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Sampah yang dibuang ke sungai tidak hanya mencemari air, tetapi juga menyumbat saluran drainase dan pipa-pipa air, sehingga ketika hujan turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan meluap masuk ke rumah-rumah warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur di kawasan kumuh bersifat sistemik dan saling terkait, dimana ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang memadai memicu perilaku buang sampah sembarangan, yang kemudian memperburuk fungsi infrastruktur drainase, dan berujung pada bencana banjir yang merugikan warga sendiri. Kondisi ini mencerminkan lingkaran setan permasalahan infrastruktur dan perilaku yang sulit diputus tanpa intervensi komprehensif yang melibatkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai sekaligus edukasi dan penegakan aturan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Selain kedua masalah umum yang terjadi di lingkungan kawasan kumuh ini, masalah susahnya air bersih justru terjadi di Kelurahan Tallo dimana Ibu NL menyatakan:

“.....disini itu dek permasalahan paling susah sekali pi dicari solusi nya air bersih, saya PDAM ku kuputus ki karena harus ki bayar bulan bulan baru airnya tidak mengalir ji kan rugi, terus ada ji mobil iya selalu bawa kan ki air tapi itupun dibeli juga dek, jadi biasa kayak saya ini ku kumpul-kumpul dulu uang ku supaya langsung mi beli banyak.....”

Ibu AS juga menjelaskan:

“.....susah sekali dek air bersih disini harus pki beli, didepan situ sebenarnya adami sumur bor dibuatkan ki toh adami juga alatnya cuma yang kelola juga na batasi na kasih mengalir itu pun juga dibayar ki dek 10ribu setiap minggu, jadi memang kita ini kodong sessa sekali ki.....”

Kedua pernyataan ini mengungkap krisis akses air bersih di Kelurahan Tallo yang menambah beban ekonomi masyarakat miskin. Layanan PDAM yang seharusnya menjadi solusi justru tidak berfungsi optimal karena aliran air yang tidak lancar, sehingga warga merasa dirugikan harus membayar biaya bulanan tanpa mendapat pasokan air yang memadai. Kondisi ini memaksa warga membeli air dari tangki keliling atau memanfaatkan sumur bor yang dikelola secara terbatas dengan sistem pembayaran. Ironisnya, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih (yang seharusnya menjadi hak setiap warga) justru menjadi beban finansial tambahan bagi masyarakat yang sudah hidup dalam kemiskinan. Warga harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membeli air dalam jumlah banyak atau membayar iuran mingguan untuk mengakses sumur bor, yang menunjukkan bahwa bahkan pemenuhan kebutuhan paling mendasar pun menjadi perjuangan ekonomi tersendiri. Fenomena ini mencerminkan kegagalan penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan kumuh, yang tidak hanya menurunkan kualitas hidup tetapi juga memperdalam kemiskinan melalui pengeluaran wajib untuk membeli kebutuhan yang seharusnya tersedia secara terjangkau.

Secara keseluruhan, permasalahan infrastruktur dasar di kawasan kumuh Kelurahan Tallo dan Kelurahan Bontorannu menunjukkan kegagalan sistemik dalam penyediaan layanan publik yang memadai. Ketiga aspek utama yaitu, pengelolaan sampah, sistem drainase, dan akses air bersih, saling terkait dan membentuk lingkaran masalah yang memperburuk kondisi kehidupan warga. Ketiadaan tempat penampungan sampah yang memadai dan ketidakteraturan jadwal pengangkutan memaksa warga membuang sampah sembarangan, baik di lahan kosong, di bawah rumah, maupun langsung ke sungai. Praktik ini diperparah oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah yang membebaskan iuran sampah tanpa menyediakan alternatif layanan, sehingga sistem pengangkutan sampah swadaya yang sebelumnya berjalan justru berhenti beroperasi. Sampah yang dibuang ke sungai kemudian menyumbat saluran drainase, menyebabkan banjir saat hujan yang merusak properti dan meningkatkan risiko penyakit.

Di sisi lain, krisis akses air bersih di Kelurahan Tallo menambah beban ekonomi masyarakat miskin. Layanan PDAM yang tidak berfungsi optimal memaksa warga membeli air dari tangki keliling atau membayar iuran untuk mengakses sumur bor, sehingga kebutuhan dasar yang seharusnya terjangkau justru menjadi

pengeluaran wajib tambahan. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan layanan publik yang tajam, di mana kawasan kumuh belum menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur kota. Tanpa intervensi komprehensif yang melibatkan penyediaan fasilitas memadai, perbaikan sistem layanan, dan konsistensi kebijakan, permasalahan infrastruktur akan terus menjadi lingkaran setan yang memperdalam kemiskinan dan menurunkan kualitas hidup warga kawasan kumuh.

d) Masalah Kesehatan dan Sanitasi

Kondisi sanitasi yang buruk di kawasan kumuh berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Keterbatasan akses terhadap air bersih, sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, serta lingkungan yang tidak higienis menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang rentan terhadap berbagai penyakit. Kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan pun masih terbatas di kalangan warga. Ibu AS menggambarkan kondisi kesehatan dan sanitasi di lingkungan mereka sebagai berikut:

“.....itu yang dibelakang memang tidak ada jamban dek, langsung ji saja mereka cemplung kebawah, itumi biasa deh bau sekali dek tapi mungkin dia sudah terbiasa mi dengan itu.....”

Ibu SP juga menyatakan hal yang sama:

“.....mau mi dimana kita tidak ada juga uang dek, tidak ada mi tempat jadi mau tidak mau kita langsung mi saja cemplung kebawah, kan nanti na ambil ji air, kadang juga ada tonji bau bau dirasa tapi terbiasa mki toh.....”

Kedua pernyataan ini mengungkap kondisi sanitasi yang sangat memprihatinkan di kawasan kumuh, di mana sebagian warga tidak memiliki akses terhadap jamban yang layak dan terpaksa membuang limbah langsung ke bawah rumah atau ke sungai. Ketiadaan fasilitas sanitasi dasar ini bukan semata-mata karena pilihan, melainkan dipaksakan oleh keterbatasan ekonomi untuk membangun jamban yang memadai. Yang lebih mengkhawatirkan adalah normalisasi terhadap kondisi tidak sehat ini, dimana warga menyatakan sudah terbiasa dengan bau dan lingkungan yang kotor, menunjukkan bahwa standar hidup sehat telah menurun sedemikian rupa hingga kondisi yang seharusnya tidak dapat diterima menjadi hal yang biasa. Praktik pembuangan limbah langsung ini menciptakan risiko kesehatan serius, terutama karena limbah tersebut kemudian terbawa air yang berpotensi mencemari sumber air yang sama yang digunakan

warga untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan lingkaran kemiskinan dan kesehatan yang berbahaya, di mana ketiadaan akses sanitasi dasar tidak hanya menurunkan martabat hidup tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit berbasis air dan lingkungan.

e) Kepadatan Penduduk yang berlebih

Kepadatan penduduk yang sangat tinggi menjadi karakteristik utama kawasan kumuh yang menimbulkan berbagai persoalan turunan. Rumah-rumah dibangun berdempetan dengan jarak yang sangat minim, gang-gang sempit bahkan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, dan ruang publik yang hampir tidak tersedia. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan hidup, tetapi juga menimbulkan risiko tinggi saat terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya yang membutuhkan akses kendaraan darurat. Berikut gambaran yang disampaikan Pak AD tentang kondisi kepadatan di lingkungan mereka:

“.....disini itu dek rata rata beranak cucu mi yang tinggal, biasa itu satu rumah dia bagi dua, supaya anaknya bisa tinggal, karena tidak adami juga pekarangannya biasa jalanan mami na simpan simpan motornya karena tidak adami teras nya toh....”

Masih di Kelurahan Bontoraanu, Ibu ML selaku ketua RT menyatakan:

“.....disini itu dek biasa satu rumah 3 Kepala Keluarga isinya, jadi biasa satu rumah itu ramai sekali, kita lihat mi toh sanging motor dalam lorong itu jadi susah sekali mki bergerak.....”

Kedua pernyataan ini menggambarkan kondisi kepadatan penduduk yang ekstrem di kawasan kumuh, di mana satu unit rumah dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga yang umumnya masih memiliki hubungan keluarga. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah memaksa keluarga untuk berbagi ruang hunian secara vertikal atau horizontal dengan membagi satu rumah menjadi beberapa bagian untuk anak-anak mereka yang telah berkeluarga. Kondisi ini menciptakan *overcrowding* yang tidak hanya mengurangi privasi dan kenyamanan, tetapi juga memunculkan persoalan teknis seperti tidak tersedianya halaman atau pekarangan untuk memarkirkan kendaraan, sehingga motor-motor harus diparkir di jalanan atau lorong yang sudah sempit. Akibatnya, gang-gang yang seharusnya menjadi jalur sirkulasi dan akses darurat menjadi semakin sempit dan sesak, bahkan sulit untuk dilewati oleh pejalan kaki sekalipun. Kepadatan seperti ini menimbulkan risiko keamanan yang serius, terutama saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat yang membutuhkan evakuasi cepat dan akses kendaraan

penyelamat, karena lorong yang penuh dengan motor dan barang-barang akan sangat menyulitkan proses pertolongan.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kelurahan Tallo, Ibu SP menyatakan:

“.....banyak warga juga yang bangun rumah di tempat tempat kosong, karena mau mi dimana kodong, mahal sekarang tanah, walaupun ada tanah mau dibangun lagi.....”

Pernyataan Ibu SP mengungkap dilema yang dihadapi warga kawasan kumuh dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Tingginya harga tanah dan keterbatasan kemampuan ekonomi memaksa warga untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tersedia, meskipun tanpa kepastian status kepemilikan yang jelas. Frasa "mau mi dimana kodong" mencerminkan ketidakberdayaan dan ketiadaan pilihan yang dihadapi masyarakat miskin dalam memperoleh tempat tinggal layak. Kondisi ini mendorong okupasi liar pada lahan-lahan kosong yang sebenarnya bukan milik mereka, yang kemudian berkembang menjadi permukiman padat tanpa perencanaan yang memadai. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kepadatan penduduk yang berlebihan, tetapi juga ketidakteraturan tata ruang dan kerentanan terhadap penggusuran di kemudian hari.

Ibu NL juga menyatakan:

“.....ini juga saya rumah mertua kodong, tinggal ma 10 tahun disini, ini saja saya 2 KK disini jadi beda pintu masuk sama kakak ipar tapi masih dalam satu lahan tanah jki.....”

Ibu NL menggambarkan strategi bertahan hidup keluarga di kawasan kumuh melalui sistem tinggal bersama keluarga besar dalam satu lahan. Meskipun telah membentuk kepala keluarga terpisah dengan membuat pintu masuk berbeda, mereka tetap menempati lahan yang sama karena keterbatasan ekonomi untuk membeli atau menyewa tempat tinggal sendiri. Kondisi ini mencerminkan sistem multi-generasi yang tinggal bersama bukan karena pilihan budaya semata, melainkan lebih karena terpaksa oleh kondisi ekonomi. Pola hunian seperti ini berkontribusi pada kepadatan penduduk yang tinggi, di mana satu pekarangan dapat dihuni oleh beberapa keluarga inti yang pada akhirnya menciptakan tekanan pada ruang hidup, fasilitas bersama, dan infrastruktur lingkungan yang sudah terbatas.

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk yang berlebihan di kawasan kumuh Kelurahan Bontorannu dan Kelurahan Tallo merupakan hasil dari interaksi

kompleks antara keterbatasan ekonomi, tingginya harga tanah, dan ketiadaan alternatif perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Pola hunian multi-generasi dan multi-kepala keluarga dalam satu unit rumah atau lahan bukan merupakan pilihan budaya, melainkan strategi bertahan hidup yang dipaksakan oleh kondisi ekonomi. Fenomena ini menciptakan *overcrowding* yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari berkurangnya privasi dan kenyamanan, hilangnya ruang publik dan halaman pribadi, hingga terganggunya akses sirkulasi akibat lorong-lorong yang dipenuhi kendaraan dan barang-barang. Yang paling mengkhawatirkan adalah risiko keamanan yang ditimbulkan, terutama saat terjadi kebakaran atau situasi darurat lainnya, karena lorong yang sempit dan sesak akan sangat menyulitkan evakuasi dan akses kendaraan penyelamat. Kepadatan penduduk yang ekstrem ini juga mendorong okupasi liar pada lahan-lahan kosong tanpa status kepemilikan yang jelas, yang tidak hanya menciptakan ketidakteraturan tata ruang tetapi juga meningkatkan kerentanan warga terhadap penggusuran. Tanpa kebijakan perumahan yang memadai dan program penataan kawasan yang mempertimbangkan daya tampung lingkungan, kepadatan penduduk di kawasan kumuh akan terus meningkat dan memperburuk kondisi infrastruktur serta kualitas hidup masyarakatnya.

f) Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Persoalan legalitas kepemilikan lahan menjadi beban psikologis tersendiri bagi masyarakat kawasan kumuh. Banyak warga yang menempati tanah tanpa status kepemilikan yang jelas, baik karena menempati lahan negara, lahan sengketa, maupun membangun tanpa izin yang sah. Ketidakpastian ini menciptakan rasa tidak aman dan kekhawatiran akan penggusuran sewaktu-waktu, sehingga warga enggan melakukan perbaikan atau investasi untuk memperbaiki kondisi rumah mereka. Ibu SP menjelaskan kondisi status kepemilikan lahan di lingkungan mereka sebagai berikut:

“.....ini juga tanah yang ditempati bukan punyata dek, kapan saja bisa ki di gusur, itu saja kemarin sudah ada mi info kalau mau ada penggusuran tapi sampai sekarang Alhamdulillah tidak adaji.....”

Pernyataan Ibu SP mengungkap ketidakpastian hukum yang menyelimuti kehidupan warga kawasan kumuh. Kesadaran bahwa mereka menempati tanah yang bukan miliknya menciptakan kecemasan konstan akan kemungkinan penggusuran yang bisa terjadi kapan saja. Informasi tentang rencana

penggusuran yang pernah beredar, meskipun belum terlaksana menambah ketegangan psikologis dan membuat warga hidup dalam ketidakpastian. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi ketenangan hidup, tetapi juga keputusan warga untuk berinvestasi memperbaiki rumah mereka, karena takut usaha dan biaya yang dikeluarkan akan sia-sia jika penggusuran benar-benar terjadi.

Ketidakpastian serupa juga dirasakan oleh warga di wilayah lain, meskipun dengan konteks yang sedikit berbeda. Ibu AS selaku ketua RT di Kelurahan Tallo menyatakan:

“.....rata-rata warga yang tinggal di pinggir laut itu bukan tanahnya, tapi karena dari dulu mi, dari masih neneknya terus ke mama nya, sekarang anaknya mi tidak adapi yang punya lahan datang untuk mau pakai ki jadi masih aman ji.....”

Ibu AS menggambarkan okupasi lahan yang telah berlangsung secara turun-temurun selama beberapa generasi. Meskipun warga menyadari bahwa tanah yang mereka tempati bukan milik mereka secara legal, penguasaan yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang memberikan semacam legitimasi sosial dan rasa aman semu. Ketiadaan tuntutan dari pemilik lahan selama puluhan tahun menciptakan persepsi bahwa mereka "masih aman", namun pada dasarnya tetap rentan secara hukum karena tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kondisi ini mencerminkan ambiguitas status lahan di kawasan kumuh, di mana penguasaan faktual tidak diimbangi dengan kepemilikan yuridis.

Kembali pada situasi yang dialami Ibu SP, kekhawatiran akan masa depan dan ketidakpastian tempat tinggal menjadi beban emosional yang harus ditanggung. Lanjut Ibu SP menyatakan:

“.....tidak tau juga dek mau ki kemana, jadi semoga tidak ada ji dulu kodong kejadian kejadian, kusuka mi juga tinggal disini.....”

Pernyataan ini mencerminkan ketidakberdayaan dan ketidakpastian yang mendalam tentang masa depan. Frasa "tidak tau juga dek mau ki kemana" menunjukkan bahwa warga tidak memiliki rencana atau alternatif tempat tinggal jika penggusuran benar-benar terjadi. Meskipun menyadari bahwa mereka hidup dalam kondisi tidak aman secara hukum, keterikatan emosional dengan lingkungan tempat tinggal dan ketiadaan pilihan ekonomi membuat mereka hanya bisa berharap agar penggusuran tidak terjadi. Kondisi ini menciptakan situasi paradoks di mana warga mencintai tempat tinggal mereka namun tidak dapat

menikmati ketenangan pikiran karena ancaman penggusuran yang selalu membayangi.

Secara keseluruhan, persoalan ketidakpastian status kepemilikan lahan di kawasan kumuh mencerminkan dimensi kemiskinan yang melampaui aspek ekonomi semata, yaitu ketidakamanan hidup dan ketiadaan jaminan masa depan. Mayoritas warga menempati lahan tanpa dokumen kepemilikan yang sah, baik karena mengokupasi lahan negara, lahan pesisir, maupun tanah terlantar yang status kepemilikannya tidak jelas. Meskipun sebagian okupasi telah berlangsung secara turun-temurun selama beberapa generasi dan memberikan legitimasi sosial, hal ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kemungkinan penggusuran. Kondisi ini menciptakan beban psikologis berkelanjutan berupa kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian yang mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan warga untuk merencanakan masa depan. Ketidakpastian status lahan juga menghambat upaya perbaikan lingkungan, karena warga enggan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki atau merenovasi rumah yang sewaktu-waktu bisa digusur. Yang lebih memprihatinkan adalah ketiadaan alternatif atau rencana relokasi bagi warga jika penggusuran benar-benar terjadi, sehingga mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar dapat terus menempati tempat tinggal yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan penyelesaian status kepemilikan lahan yang memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi penghuninya, sehingga mereka dapat berinvestasi untuk memperbaiki kondisi hunian dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik.

2. Perilaku Sosial yang Menghambat Peningkatan Kualitas Hidup

Selain permasalahan sosial yang bersifat struktural, kawasan kumuh juga dihadapkan pada tantangan perilaku sosial masyarakat yang secara tidak disadari menghambat upaya peningkatan kualitas hidup. Perilaku-perilaku ini bukanlah penyebab utama kemiskinan, melainkan lebih merupakan akibat dari kondisi kemiskinan yang berkepanjangan dan lingkungan yang tidak mendukung, namun kemudian berkembang menjadi penghalang bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian lapangan mengungkap bahwa meskipun program-program perbaikan

infrastruktur dan bantuan sosial telah dilakukan, efektivitasnya sering terhambat oleh pola perilaku masyarakat yang telah mengakar dan sulit diubah. Memahami perilaku-perilaku ini menjadi penting karena tanpa perubahan perilaku, perbaikan fisik dan bantuan ekonomi saja tidak akan cukup untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Temuan lapangan mengidentifikasi beberapa perilaku sosial yang menghambat kualitas kehidupan di kawasan kumuh, diantaranya:

a) Sikap Apatitis dan Ketergantungan

Salah satu hambatan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh adalah sikap apatis dan ketergantungan yang telah mengakar dalam pola pikir masyarakat. Kondisi kemiskinan yang berkepanjangan telah menumbuhkan sikap pasrah dan fatalistik, di mana warga cenderung menerima keadaan apa adanya tanpa berupaya melakukan perubahan. Ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi sangat tinggi, sementara inisiatif untuk swadaya atau memperbaiki kondisi secara mandiri sangat minim. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu ML:

“...deh disini itu warga ku kalau dibilang ji bantuan deh cepat sekali, tapi kalau kerja bakti mana ada, itumi juga biasa kasih malas ki apa semua pergi kerja padahal masih sehat ji karena dapat mi toh ta 900ribu itu bantuannya....”

Pernyataan Ibu ML mengungkap kontras yang tajam antara antusiasme warga terhadap bantuan sosial dengan keengganan mereka untuk terlibat dalam kegiatan swadaya seperti kerja bakti. Kontradiksi ini menunjukkan adanya mentalitas menunggu bantuan yang telah mengakar, di mana warga lebih memilih menerima bantuan pasif daripada berkontribusi aktif dalam memperbaiki lingkungan mereka sendiri. Yang lebih memprihatinkan adalah fenomena warga yang masih produktif dan sehat justru memilih untuk tidak bekerja dengan alasan sudah mendapat bantuan rutin sebesar 900 ribu rupiah, yang sebenarnya seharusnya menjadi bantuan tambahan bukan pengganti penghasilan. Kondisi ini mencerminkan bagaimana program bantuan sosial, meskipun bertujuan baik, dapat menciptakan *dependency syndrome* jika tidak disertai dengan pendampingan dan pemberdayaan yang tepat.

Fenomena serupa juga diamati oleh tokoh masyarakat lainnya di wilayah berbeda. Sama juga dengan yang dikatakan Ibu AS, yang menyatakan:

“...deh disini warga kalau bantuan ji cepat nya semua, tapi kalau bersih bersih mi aih mundur mi, saya juga tidak tau kenapa begitu di....”

Ibu AS memperkuat temuan tentang ketidakseimbangan antara antusiasme menerima bantuan dengan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Keengganan warga untuk terlibat dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan menunjukkan lemahnya rasa kepemilikan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Kebingungan Ibu AS tentang perilaku ini mencerminkan bahwa bahkan tokoh masyarakat yang seharusnya memahami dinamika warga pun kesulitan memahami akar masalah dari sikap apatis ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perilaku tersebut telah menjadi norma sosial yang diterima secara luas, bukan sekadar kasus individual.

Pandangan dari perspektif pemerintah kelurahan memberikan dimensi lain dari persoalan ini. Sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Staf Kelurahan Bontorannu yang mengatakan:

“.....hampir mi itu disini 70% warga dapat, mau semua miskin, na tau mi kodong miskin ki malas tommi pergi kerja, dia tommo juga kalasi.....”

Pernyataan dari staf kelurahan ini mengungkap frustrasi pemerintah dalam menghadapi fenomena kemiskinan yang disertai dengan sikap enggan bekerja. Meskipun pernyataan ini terkesan *judgmental* dengan mengaitkan kemiskinan dengan kemalasan, namun mengindikasikan adanya persepsi bahwa sebagian warga memilih untuk bergantung pada bantuan sosial daripada berupaya mencari pekerjaan. Angka 70% penerima bantuan yang disebutkan menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Namun perlu dicatat bahwa penilaian tentang "kemalasan" ini perlu dikaji lebih dalam, karena bisa jadi yang terlihat sebagai kemalasan sebenarnya adalah ketiadaan peluang kerja yang layak, rendahnya keterampilan, atau bahkan depresi dan kehilangan harapan akibat kemiskinan yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, ketiga pernyataan di atas menggambarkan bagaimana sikap apatis dan ketergantungan telah menjadi masalah sistemik di kawasan kumuh yang diamati oleh berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga aparat pemerintah. Tingginya antusiasme terhadap bantuan sosial yang kontras dengan rendahnya partisipasi dalam kegiatan swadaya menunjukkan telah terjadinya pergeseran orientasi masyarakat dari sikap mandiri menjadi sangat bergantung pada bantuan eksternal. Fenomena ini tidak hanya menghambat upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui gotong royong, tetapi juga menciptakan siklus ketergantungan yang justru melanggengkan kemiskinan.

Program bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman dan stimulus untuk bangkit justru menjadi zona nyaman yang mengurangi motivasi untuk bekerja dan berusaha. Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mendesain program bantuan sosial yang tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga membangun kemandirian dan etos kerja masyarakat. Tanpa perubahan paradigma dari mentalitas "menunggu bantuan" menjadi "berusaha dan diberdayakan", upaya peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh akan sulit mencapai keberlanjutan.

b) Perilaku Tidak Sehat terhadap Lingkungan

Perilaku masyarakat terhadap lingkungan menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kawasan kumuh. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik di sungai, lahan kosong, maupun di bawah rumah, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya sanitasi yang baik telah menjadi praktik yang lumrah dan dianggap wajar. Meskipun dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan sudah terlihat jelas, perilaku ini terus berlanjut karena dianggap sebagai satu-satunya solusi praktis menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berikut gambaran perilaku tidak sehat terhadap lingkungan yang disampaikan oleh Ibu NL:

“.....biasa itu toh dek, kan sudah ji kubilang jangan ki buang sampah disitu kasihan yang rumah nya dekat situ nanti bau ki, biasa na baleki jki dek bilang ki bukan ji juga rumah mu, jadi itumi biasa kasih tidak enak.....”

Pernyataan Ibu NL mengungkap tidak hanya perilaku membuang sampah sembarangan, tetapi juga sikap defensif dan resistensi warga ketika ditegur. Respons "bukan ji juga rumah mu" menunjukkan lemahnya rasa kepemilikan bersama terhadap lingkungan dan kurangnya empati terhadap tetangga yang terdampak. Sikap ini mencerminkan individualisasi masalah lingkungan, di mana setiap orang merasa berhak membuang sampah di mana saja asalkan bukan di properti mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa teguran dari tokoh masyarakat seperti ketua RT justru menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan, sehingga membuat kontrol sosial menjadi tidak efektif.

Perilaku serupa juga dilakukan dengan alasan kepraktisan, sebagaimana dijelaskan oleh warga lainnya. Ibu SP juga menyatakan:

“....jauh sekali itu tempat sampah dek jadi buang mi saja langsung kebawah, karena begitu semua ji orang dek....”

Ibu SP memberikan justifikasi praktis untuk perilaku membuang sampah di bawah rumah, yaitu jarak yang jauh ke tempat pembuangan sampah. Namun yang lebih signifikan adalah frasa "karena begitu semua ji orang" yang menunjukkan adanya normalisasi perilaku buruk. Ketika perilaku tidak sehat telah menjadi norma sosial yang umum dan diterima oleh mayoritas, individu merasa terbebas dari tanggung jawab moral untuk berperilaku berbeda. Fenomena social conformity ini membuat perilaku buruk terus mereproduksi dirinya sendiri karena tidak ada tekanan sosial untuk berubah. Sebaliknya, justru orang yang ingin berperilaku baik akan merasa "aneh" atau "repot sendiri" jika harus berjalan jauh membuang sampah sementara yang lain membuang sembarangan.

Pola serupa juga terjadi dalam konteks pembuangan sampah ke sungai, seperti yang dijelaskan oleh informan lain. Ibu SL menyatakan:

“.....itu biasa kalau sudah mki kumpul sampah terus lama sekali datang tukang sampah atau malas mki bawa ki kedepan dibuang mi di Sungai ka itu sana dekat sekali ji dari rumah....”

Pernyataan Ibu SL mengungkap dua faktor pendorong pembuangan sampah ke sungai: keterlambatan pengangkutan sampah dan kemalasan membawa sampah ke tempat yang jauh. Menariknya adalah penggunaan kata "malas" yang menunjukkan bahwa warga sebenarnya menyadari ada alternatif lain (membawa ke depan), tetapi memilih cara termudah meskipun merusak lingkungan. Kedekatan sungai dengan rumah menjadi "godaan" untuk membuang sampah karena lebih praktis, tanpa mempertimbangkan bahwa sungai yang tercemar akan berdampak pada banjir, penyakit, dan pencemaran lingkungan yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Perilaku ini mencerminkan orientasi jangka pendek yang mengutamakan kemudahan sesaat daripada keberlanjutan lingkungan.

Permasalahan perilaku tidak sehat terhadap lingkungan juga terjadi pada aspek sanitasi, sebagaimana diungkapkan oleh pihak pemerintah kelurahan. Salah satu staf Kelurahan Tallo menyatakan:

“.....sudah adami itu bantuan jamban masuk dek, tapi kan namanya dipakai umum jadi memang mungkin cepat ki full, nah pas tersumbat ki malas mi semua pergi perbaiki sama malas ki melapor, jadi kembali mi ke kebiasaan lama nya langsung cemplung saja kalau mau BAB....”

Pernyataan staf kelurahan ini mengungkap kegagalan program bantuan jamban akibat perilaku masyarakat yang tidak mendukung. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas jamban umum, kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif membuat fasilitas tersebut tidak terawat. Ketika jamban mengalami kerusakan, tidak ada inisiatif dari warga untuk memperbaiki atau bahkan sekadar melapor, melainkan langsung kembali ke kebiasaan lama yang tidak sehat yaitu buang air besar sembarangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur saja tidak cukup tanpa disertai perubahan perilaku dan sistem pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sikap "malas memperbaiki" dan "malas melapor" mencerminkan rendahnya rasa kepemilikan terhadap fasilitas bersama dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga fasilitas sanitasi untuk kesehatan kolektif.

Secara keseluruhan, keempat pernyataan di atas menggambarkan bahwa perilaku tidak sehat terhadap lingkungan di kawasan kumuh bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, tetapi juga oleh faktor perilaku dan budaya masyarakat yang telah mengakar. Pembuangan sampah sembarangan telah dinormalisasi dan menjadi perilaku yang diterima secara sosial, bahkan ada resistensi kuat terhadap upaya mengubahnya. Justifikasi praktis seperti jarak yang jauh atau keterlambatan pengangkutan sampah menjadi alasan untuk tetap mempertahankan kebiasaan buruk, padahal sebenarnya lebih merupakan cerminan dari sikap malas dan orientasi jangka pendek yang mengutamakan kemudahan pribadi. Yang paling memprihatinkan adalah ketika fasilitas sanitasi yang baik telah disediakan oleh pemerintah, kurangnya partisipasi dalam pemeliharaan membuat fasilitas tersebut cepat rusak dan terbengkalai. Pola perilaku ini menciptakan lingkaran setan: lingkungan buruk menciptakan perilaku tidak sehat, dan perilaku tidak sehat memperburuk lingkungan. Tanpa intervensi edukasi yang intensif, penegakan aturan yang konsisten, dan pembangunan rasa kepemilikan kolektif terhadap lingkungan, perilaku ini akan terus menjadi penghalang utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh, bahkan ketika infrastruktur telah diperbaiki.

c) Lemahnya Solidaritas dan Kontrol Sosial

Solidaritas sosial dan mekanisme kontrol sosial yang seharusnya menjadi kekuatan dalam mengatasi permasalahan bersama justru sangat lemah di kawasan kumuh. Rasa kebersamaan dan gotong royong yang dahulu menjadi ciri

masyarakat Indonesia telah terkikis oleh kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatnya sikap individualistis. Yang lebih memprihatinkan adalah lemahnya pengawasan sosial terhadap perilaku menyimpang, di mana warga dan bahkan tokoh masyarakat enggan menegur atau memberikan sanksi sosial karena takut memicu konflik yang lebih besar. Kondisi ini diungkapkan oleh Ibu NL:

“....biasa di lihat lihat mami karena nanti tersinggung ki kalau ditegur, karena masih keluarga ji juga semua disini jadi tidak enakki....”

Pernyataan Ibu NL mengungkap dilema yang dihadapi tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Keengganan untuk menegur perilaku yang salah bukan karena tidak menyadari adanya masalah, melainkan karena takut merusak hubungan sosial dan memicu konflik. Ikatan kekeluargaan yang erat, yang seharusnya menjadi modal sosial positif, justru menjadi penghalang dalam penegakan norma karena menciptakan situasi "tidak enak" atau canggung untuk menegur anggota keluarga. Kondisi ini mencerminkan prioritas yang keliru di mana harmoni sosial semu lebih diutamakan daripada perbaikan perilaku, sehingga pelanggaran norma dibiarkan terus berlanjut demi menghindari ketidaknyamanan interpersonal. Akibatnya, tidak ada konsekuensi sosial bagi mereka yang berperilaku buruk, yang justru memperkuat dan melanggengkan perilaku tersebut.

Lemahnya solidaritas sosial juga tercermin dari minimnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong yang sebenarnya telah difasilitasi oleh pemerintah. Ibu ML mengungkapkan:

“.....kan ini dari Kelurahan ada mi tawwa program dia kasih ki setiap jumat ganti-gantian tiap hari jumat kerjabakti RW nya, jadi satu hari sebelumnya itu di umumkan mi di masjid kalau besok mau kerja bakti, deh pas hari jumat nya mi tidak cukup jki 10 orang yang turun itu pun sama mi orang kelurahan jadi biasa 5 orang ji warga....”

Ibu ML menggambarkan kegagalan program kerja bakti yang sebenarnya telah diorganisir dengan baik oleh pemerintah kelurahan. Meskipun telah ada pengumuman di masjid sehari sebelumnya, partisipasi warga sangat minim, bahkan tidak mencapai 10 orang, dan itu pun termasuk petugas kelurahan sehingga warga murni hanya sekitar 5 orang. Fakta bahwa petugas kelurahan harus turun langsung menunjukkan bahwa tanpa kehadiran pemerintah, kegiatan gotong royong hampir tidak mungkin terlaksana. Kondisi ini mencerminkan pudarnya nilai gotong royong sebagai budaya masyarakat, di mana kegiatan

bersama untuk kepentingan lingkungan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban sosial melainkan sebagai beban yang bisa dihindari. Rendahnya partisipasi ini juga menunjukkan lemahnya rasa kepemilikan kolektif terhadap lingkungan tempat tinggal.

Keengganan menegur juga terjadi dalam konteks pengawasan terhadap perilaku anak muda yang berpotensi menimbulkan masalah. Pak AD menjelaskan:

“.....biasa itu kalau anak anak muda kumpul kumpul di tegur ji dulu, tapi biasa kepala batu ki baru agak kurang enak di tegur kasar karena nanti orang tua nya lagi yang tersinggung berkelahi mi sede orang....”

Pak AD mengungkapkan kompleksitas dalam melakukan kontrol sosial terhadap perilaku anak muda. Meskipun ada upaya untuk menegur, resistensi dari anak muda ("kepala batu") dan potensi konflik dengan orang tua mereka membuat penegakan aturan menjadi sangat sulit. Fenomena di mana orang tua justru membela anak yang berperilaku salah mencerminkan lemahnya otoritas moral di tingkat keluarga dan masyarakat. Ancaman "berkelahi mi sede orang" (malah berkelahi dengan orang tua) menunjukkan bahwa upaya penegakan norma justru berisiko memicu konflik horizontal yang lebih besar. Kondisi ini menciptakan situasi paradoks di mana tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi penjaga norma justru menjadi pihak yang paling rentan jika mencoba menegakkan aturan, sehingga pilihan teraman adalah membiarkan perilaku menyimpang berlanjut.

Perspektif dari pemerintah kelurahan memperkuat gambaran tentang lemahnya solidaritas dan kontradiksi perilaku warga. Staff Kelurahan Bontorannu membenarkan:

“....bagusnya mi itu program yang na buat kodong Pak Lurah, setiap jumat ganti gentian, tapi toh dek biasa dua hari setelah kerja bakti sembarang mi sede na buang sampahnya, baru kalau kerja bakti ki itu tidak ikut ki bergabung, nanti kalau ada mi bantuan nomor satu semua berkumpul.....”

Pernyataan staf kelurahan ini mengungkapkan ironi yang menyedihkan, dimana warga yang tidak mau bergotong royong membersihkan lingkungan justru yang paling cepat merusak kembali hasil kerja bakti hanya dua hari kemudian dengan membuang sampah sembarangan. Kontradiksi ini menunjukkan tidak hanya lemahnya solidaritas tetapi juga ketiadaan rasa hormat terhadap usaha kolektif. Yang lebih ironis lagi adalah kontras tajam antara minimnya partisipasi dalam

kerja bakti dengan antusiasme tinggi ketika ada pembagian bantuan "nomor satu semua berkumpul". Fenomena ini mencerminkan mentalitas *take without give*, di mana warga hanya ingin menerima manfaat tanpa mau berkontribusi. Perilaku ini tidak hanya merusak hasil program pemerintah tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi sedikit warga yang konsisten berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong sementara yang tidak berpartisipasi tetap menikmati manfaat yang sama, bahkan lebih.

Secara keseluruhan, keempat pernyataan di atas menggambarkan erosi serius terhadap modal sosial di kawasan kumuh, khususnya dalam hal solidaritas dan mekanisme kontrol sosial. Rasa kebersamaan dan gotong royong yang dahulu menjadi kekuatan masyarakat Indonesia telah digantikan oleh sikap individualistis dan mentalitas "*free rider*" yang hanya ingin menerima manfaat tanpa berkontribusi. Mekanisme kontrol sosial yang seharusnya menjadi alat untuk menegakkan norma dan mencegah perilaku menyimpang telah lumpuh karena ketakutan akan konflik dan keengganan merusak harmoni sosial semu. Tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi garda depan penegakan norma justru menjadi pihak yang paling rentan dan memilih sikap pasif untuk menghindari konflik dengan warga atau keluarga mereka. Yang paling memprihatinkan adalah kontradiksi perilaku di mana warga yang tidak mau berpartisipasi dalam gotong royong justru yang paling cepat merusak hasil kerja bersama, sementara antusiasme mereka sangat tinggi ketika ada bantuan yang dibagikan. Kondisi ini menciptakan siklus negatif di mana lemahnya solidaritas dan kontrol sosial membuat perilaku buruk terus berlanjut tanpa konsekuensi, yang pada akhirnya menghambat semua upaya perbaikan kolektif. Tanpa rekonstruksi modal sosial melalui penguatan nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan mekanisme sanksi sosial yang tegas namun konstruktif, upaya peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh akan terus menemui jalan buntu karena tidak ada kekuatan kolektif yang mampu mendorong dan mempertahankan perubahan positif.

d) Partisipasi Selektif terhadap Program Pemberdayaan

Paradoks yang menarik terjadi dalam respons masyarakat kawasan kumuh terhadap berbagai program pemerintah. Di satu sisi, warga menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi terhadap program-program yang memberikan manfaat langsung dan individual. Namun di sisi lain, partisipasi mereka sangat rendah bahkan cenderung resisten terhadap program-program yang menuntut

kontribusi aktif dan perubahan perilaku, sikap selektif ini mencerminkan orientasi yang lebih mengutamakan penerimaan manfaat jangka pendek daripada investasi untuk perbaikan berkelanjutan yang memerlukan usaha dan komitmen kolektif. Fenomena ini menjadi hambatan serius dalam implementasi program-program pemberdayaan yang sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup jangka panjang masyarakat kawasan kumuh. Berikut gambaran dari Ibu ML tentang bagaimana sikap selektif ini termanifestasi dalam komunitas mereka:

“.....disini itu dek warga ku hampir mi setengahnya dapat program dari dinas perumahan itu yang bedah rumah, itu semua semangat nya waktu mau kumpul berkas nya untuk di daftarkan namanya, pas program kebersihan yang dikasih ki dari kelurahan untuk bersih bersih tiap hari jumat deh kodong tidak adami mau muncul muncul....”

Pernyataan Ibu ML mengungkap kontras yang sangat tajam dalam sikap warga terhadap dua jenis program pemerintah. Antusiasme luar biasa ditunjukkan saat program bedah rumah dari Dinas Perumahan dibuka, dimana hampir setengah warga wilayahnya mendaftar dengan semangat mengumpulkan berkas persyaratan. Ini menunjukkan bahwa warga sebenarnya memiliki energi, motivasi, dan kemampuan untuk berorganisasi ketika ada insentif yang jelas dan menguntungkan secara individual. Namun semangat yang sama sekali tidak muncul untuk program kebersihan rutin setiap hari Jumat yang justru lebih sederhana dan tidak memerlukan administrasi rumit. Frasa "tidak adami mau muncul muncul" menggambarkan ketiadaan partisipasi yang nyaris total. Fenomena ini mencerminkan mentalitas transaksional di mana partisipasi hanya muncul ketika ada "imbalan" konkret yang bisa diterima secara pribadi, bukan karena kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan bersama. Program bedah rumah memberikan manfaat langsung berupa perbaikan rumah pribadi tanpa biaya, sementara program kebersihan memerlukan waktu dan tenaga tanpa imbalan material langsung, meskipun manfaatnya untuk kesehatan dan kenyamanan bersama.

Pola serupa juga diamati di wilayah lain, dengan dampak yang membebani para tokoh masyarakat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu AS yang menyatakan:

“.....sebenarnya kita ini juga biasa dari kelurahan adaji dek bersih bersih nya tapi itu mi kita kita ji kodong, Ketua RT, RW yang membersihkan warga biasa tidak maui ikut, tidak tau juga kenapa begitu kodong.....”

Ibu AS mengungkap konsekuensi dari rendahnya partisipasi warga, yaitu beban kerja program-program kolektif akhirnya hanya ditanggung oleh segelintir tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan RW. Frasa "itu mi kita kita ji kodong" (hanya kami-kami saja) mencerminkan kelelahan dan frustrasi dari para pengurus yang harus bekerja sendiri untuk kepentingan bersama sementara warga yang akan menikmati hasilnya justru tidak mau berpartisipasi. Kebingungan Ibu AS "tidak tau juga kenapa begitu kodong" menunjukkan bahwa bahkan tokoh masyarakat yang berinteraksi langsung dengan warga pun kesulitan memahami akar dari sikap apatis ini. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak adil dan tidak berkelanjutan, di mana beban tanggung jawab kolektif hanya dipikul oleh orang-orang yang sama secara terus-menerus, sementara mayoritas warga menjadi *free riders* yang menikmati hasil kerja orang lain tanpa kontribusi. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menyebabkan *burnout* pada para tokoh masyarakat dan berpotensi membuat program-program berbasis partisipasi masyarakat benar-benar kolaps.

Secara keseluruhan, kedua pernyataan di atas menggambarkan fenomena partisipasi selektif yang sangat kontraproduktif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh. Warga menunjukkan bahwa mereka mampu berorganisasi, bersemangat, dan aktif berpartisipasi, tetapi hanya ketika ada manfaat individual yang konkret dan langsung. Sebaliknya, program-program yang memerlukan kontribusi kolektif untuk kepentingan bersama, meskipun jauh lebih sederhana dan tidak memerlukan administrasi rumit, justru ditinggalkan. Sikap ini mencerminkan lemahnya kesadaran akan tanggung jawab kolektif dan orientasi yang sangat individualistis serta transaksional. Masyarakat melihat program pemerintah bukan sebagai kesempatan untuk bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik, melainkan sebagai sumber manfaat yang harus diambil sebanyak-banyaknya tanpa kewajiban memberi kontribusi balik. Paradoks ini menjadi tantangan serius bagi desain program pemberdayaan masyarakat, karena mengindikasikan bahwa tanpa insentif material langsung, partisipasi akan sangat rendah. Hal ini juga menunjukkan kegagalan dalam membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap lingkungan dan kesadaran bahwa perbaikan lingkungan bersama pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, termasuk mereka sendiri. Jika pola ini tidak diubah, program-program pemberdayaan yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat akan terus gagal

mencapai tujuannya, dan kawasan kumuh akan tetap bergantung pada intervensi eksternal yang bersifat *charity* daripada berkembang menjadi komunitas yang mandiri dan berdaya.

e) Pola Konsumsi dan Prioritas yang Tidak Produktif

Pola konsumsi dan prioritas pengeluaran masyarakat kawasan kumuh seringkali tidak mendukung upaya peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Meskipun penghasilan sangat terbatas, prioritas pengeluaran tidak selalu diarahkan pada hal-hal produktif seperti perbaikan rumah, pendidikan anak, atau kesehatan keluarga. Rendahnya investasi untuk memperbaiki kondisi hunian dan sanitasi, serta kurangnya kebiasaan menabung atau merencanakan keuangan untuk masa depan, membuat masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Berikut paparan Staf Kelurahan Bontorannu terkait pola konsumsi dan prioritas yang ada di lingkungan mereka:

“.....jadi itu disini dek sebenarnya, memang mayoritas hampir 70% warga itu penerima bantuan, tapi coba mi kita lihat dirumahnya itu mereka rata rata pakai motor NMAX, pakai Iphone, sebenarnya itu bukan urusan ta tapi kalau dilihat ki langsung bikin geleng geleng kepala.....”

Pernyataan staf kelurahan ini mengungkap kontradiksi mencolok antara status kemiskinan formal dengan pola konsumsi yang tidak mencerminkan keterbatasan ekonomi. Fakta bahwa 70% warga menerima bantuan sosial, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun memiliki aset konsumtif mewah seperti motor NMAX dan iPhone menimbulkan pertanyaan serius tentang akurasi pendataan kemiskinan dan prioritas pengeluaran masyarakat. Frasa "bikin geleng geleng kepala" mencerminkan kebingungan dan keprihatinan bahwa sumber daya yang terbatas tidak dialokasikan untuk kebutuhan dasar atau investasi produktif, melainkan untuk simbol status sosial yang bersifat konsumtif. Fenomena ini menunjukkan adanya misalokasi sumber daya di mana uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah, membangun sanitasi yang layak, atau ditabung untuk pendidikan anak, justru digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan jangka panjang. Lebih jauh lagi, ini mengindikasikan kemungkinan adanya penyalahgunaan sistem bantuan sosial atau ketidaktepatan targeting, di mana orang yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli barang mewah masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Observasi serupa juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat lain yang melihat ketidaksesuaian antara penampilan fisik dengan klaim kemiskinan. Pak AD juga menyatakan hal yang sama:

“.....disini itu dek tempat nya ji dilihat miskin, tapi bergaya semua ji, motor nya bagus, hp nya bagus, cantik cantik semua itu kalau mau keluar orang disini tapi kalau dibilang mi bantuan uh nomor satu mi itu semua....”

Pak AD memperkuat temuan tentang paradoks antara kondisi lingkungan kumuh dengan gaya hidup konsumtif warganya. Kontras antara "tempat nya ji dilihat miskin" dengan "bergaya semua ji" menunjukkan prioritas yang terbalik, investasi untuk penampilan pribadi (motor bagus, HP bagus, berpenampilan cantik) jauh lebih tinggi daripada investasi untuk perbaikan rumah dan lingkungan. Ironisnya, warga yang memiliki kemampuan untuk "bergaya" ini adalah orang-orang yang paling antusias mendaftar bantuan sosial "nomor satu mi itu semua". Fenomena ini mencerminkan beberapa masalah sekaligus: pertama, adanya distorsi nilai di mana penampilan luar dan status sosial lebih penting daripada kualitas hunian; kedua, tidak adanya malu sosial atau stigma dalam menerima bantuan meskipun memiliki kemampuan ekonomi yang cukup; dan ketiga, ketiadaan mekanisme verifikasi yang efektif untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pola konsumsi ini menunjukkan orientasi jangka pendek yang hanya fokus pada kepuasan dan pengakuan sosial sesaat, tanpa pertimbangan untuk membangun aset produktif atau meningkatkan kondisi kehidupan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kedua pernyataan di atas mengungkap permasalahan serius terkait pola konsumsi dan prioritas pengeluaran di kawasan kumuh yang justru melanggengkan kemiskinan dan kondisi kekumuhan. Meskipun mayoritas warga tercatat sebagai penerima bantuan sosial untuk orang miskin, pola konsumsi mereka menunjukkan kemampuan untuk membeli barang-barang mewah yang bersifat konsumtif seperti motor premium dan smartphone mahal. Paradoks ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan semata-mata ketiadaan sumber daya ekonomi, melainkan misalokasi sumber daya yang ada. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi produktif seperti memperbaiki kondisi rumah, membangun jamban yang layak, meningkatkan sanitasi, atau menabung untuk pendidikan anak, justru dialokasikan untuk konsumsi barang-barang yang

memberikan prestise sosial tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Fenomena ini juga mengindikasikan adanya distorsi sistem bantuan sosial di mana orang yang sebenarnya memiliki kapasitas ekonomi masih terdaftar dan antusias menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan mungkin tidak mendapat akses. Pola perilaku ini mencerminkan orientasi hedonistik dan jangka pendek yang mengutamakan kepuasan konsumsi sesaat dan pengakuan sosial daripada pembangunan aset dan peningkatan kualitas hidup berkelanjutan. Tanpa perubahan paradigma dari konsumsi konsumtif menuju investasi produktif, serta perbaikan dalam sistem targeting bantuan sosial, masyarakat kawasan kumuh akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan meskipun memiliki akses terhadap sumber daya yang sebenarnya cukup untuk melakukan perbaikan kondisi mereka. Hal ini juga menunjukkan pentingnya literasi keuangan dan pendampingan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi agar masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

3. Peran Kelompok Sosial dalam Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Warga

Masyarakat di kawasan kumuh Kelurahan Bontorannu dan Kecamatan Tallo memiliki struktur sosial yang terdiri dari berbagai kelompok formal maupun informal yang sebenarnya dapat menjadi saluran efektif untuk edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik, bentuk kegiatan, dan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Penelitian lapangan mengungkap bahwa meskipun kelompok-kelompok ini aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, peran mereka dalam mengubah perilaku warga terhadap lingkungan masih sangat minimal dan menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya edukasi dan peningkatan kesadaran warga, berikut dipaparkan peran masing-masing kelompok sosial berdasarkan temuan lapangan.

a) Kelompok Formal (RT/RW dan Pemerintah Kelurahan)

Kelompok formal seperti RT/RW dan pemerintah kelurahan merupakan struktur organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan menggerakkan warga untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawah, RT/RW memiliki legitimasi dan akses langsung kepada warga untuk melakukan sosialisasi program, mengkoordinasi kegiatan gotong

royong, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok formal ini, mulai dari penetapan jadwal kerja bakti rutin, penyebaran informasi melalui pengumuman di masjid dan grup WhatsApp, hingga pencatatan kehadiran warga dalam kegiatan bersama. Namun, efektivitas upaya-upaya tersebut masih jauh dari harapan karena berbagai hambatan yang dihadapi. Berikut gambaran peran kelompok formal berdasarkan penuturan Ibu AS:

“.....ada itu grup WA nya dek, kita selalu mi informasikan kalau misal besok ada kegiatan kerja bakti di keluar ki semua biasa tidak ada ji peduli, biasa tong itu depan rumahnya ji na bersihkan.....”

Pernyataan Ibu AS mengungkap kegagalan komunikasi digital sebagai sarana mobilisasi warga. Meskipun teknologi WhatsApp telah digunakan sebagai media penyebaran informasi yang seharusnya lebih cepat dan efektif, respon warga sangat minim, mereka "tidak ada ji peduli" terhadap ajakan kerja bakti yang disampaikan. Yang lebih memprihatinkan adalah sikap warga yang hanya membersihkan bagian depan rumah mereka sendiri, menunjukkan mentalitas individualistis di mana tanggung jawab lingkungan bersama telah tereduksi menjadi tanggung jawab pribadi yang sangat terbatas. Fenomena ini mencerminkan bahwa keberadaan infrastruktur komunikasi modern tidak otomatis mengubah sikap dan perilaku masyarakat jika tidak disertai dengan kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan terhadap lingkungan bersama.

Upaya mobilisasi tidak hanya dilakukan melalui media digital, tetapi juga melalui cara-cara tradisional yang seharusnya lebih efektif dalam konteks masyarakat lokal. Ibu ML menyatakan:

“.....diumumkan mi itu dek di masjid kalau mau ki kerja bakti, di ajak mi juga dengan kelilingka infokan satu satu kalau adaji duduk depan rumahnya tidak tonji memang mau ikut....”

Ibu ML menggambarkan upaya maksimal yang telah dilakukan RT/RW dengan menggunakan *multi-channel communication*, pengumuman di masjid yang merupakan pusat spiritual dan sosial masyarakat, ditambah dengan pendekatan personal *door-to-door* mengajak warga satu per satu. Intensitas upaya ini menunjukkan keseriusan RT/RW dalam menggerakkan warga, namun hasilnya tetap mengecewakan, warga yang didatangi dan diajak langsung pun tetap tidak mau berpartisipasi. Frasa "tidak tonji memang mau ikut" mencerminkan resistensi yang tegas dan bukan sekadar ketidaktahuan atau kurangnya

informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada sistem komunikasi atau penyebaran informasi, melainkan pada sikap fundamental warga yang memang tidak memiliki motivasi atau rasa tanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan kolektif. Kegagalan pendekatan personal ini juga menunjukkan lemahnya otoritas dan pengaruh RT/RW dalam menggerakkan warga, meskipun mereka adalah struktur kepemimpinan formal di tingkat paling dasar.

Perspektif dari pihak pemerintah kelurahan memberikan konfirmasi lebih lanjut tentang rendahnya partisipasi warga dan dampaknya terhadap beban kerja aparat. Staff Kelurahan menyatakan:

“.....kita ini turun juga ke lokasi untuk sama sama kerja bakti tiap jumat ganti-gantian tapi memang dari mereka yang tidak mau aktif dek bersihkan tempatnya, mungkin na pikir ki ada jki bersihkan jadi dia tidak perlumi....”

Pernyataan staf kelurahan ini mengungkap ironi yang menyedihkan dalam program kerja bakti, pemerintah kelurahan secara konsisten turun langsung ke lokasi setiap Jumat secara bergiliran untuk bergotong royong bersama warga, namun partisipasi warga justru sangat minim. Yang lebih problematik adalah analisis staf tentang pola pikir warga "mungkin na pikir ki ada jki bersihkan jadi dia tidak perlumi", yang menunjukkan adanya moral *hazard* di mana kehadiran petugas pemerintah justru menciptakan ketergantungan dan menghilangkan rasa tanggung jawab warga. Warga merasa bahwa karena ada petugas yang akan membersihkan, mereka tidak perlu repot-repot ikut serta. Fenomena ini mencerminkan kegagalan program pemerintah yang seharusnya memberdayakan justru menciptakan sikap pasif dan ketergantungan. Kehadiran pemerintah yang awalnya dimaksudkan sebagai stimulus dan contoh teladan justru menjadi substitusi total bagi partisipasi warga, sehingga program yang dirancang untuk membangun kemandirian dan kesadaran kolektif berubah menjadi layanan yang diharapkan warga tanpa mereka harus berkontribusi.

Secara keseluruhan, ketiga pernyataan di atas menggambarkan kegagalan sistemik kelompok formal (RT/RW dan pemerintah kelurahan) dalam menjalankan fungsi edukasi dan mobilisasi warga untuk perbaikan lingkungan. Meskipun telah menggunakan berbagai strategi komunikasi, dari teknologi modern seperti WhatsApp, pendekatan tradisional melalui pengumuman masjid, hingga pendekatan personal *door-to-door* respon warga tetap sangat minim. Yang lebih

memprihatinkan adalah bahwa rendahnya partisipasi ini bukan disebabkan oleh kurangnya informasi atau kesulitan akses, melainkan karena sikap fundamental warga yang memang tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam kegiatan kolektif. Warga telah mengadopsi mentalitas individualistis yang sangat sempit, di mana tanggung jawab lingkungan hanya terbatas pada membersihkan depan rumah sendiri, sementara lingkungan bersama dianggap bukan urusan mereka. Lebih jauh lagi, kehadiran pemerintah yang konsisten dalam kegiatan kerja bakti justru menciptakan efek kontraproduktif berupa moral hazard, di mana warga merasa tidak perlu berpartisipasi karena yakin ada pihak lain yang akan menanganinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan mobilisasi yang dilakukan kelompok formal belum menyentuh akar masalah, yaitu membangun kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan terhadap lingkungan bersama. Tanpa perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat service delivery menjadi pendekatan pemberdayaan yang membangun tanggung jawab dan partisipasi aktif, serta tanpa adanya mekanisme insentif dan sanksi yang jelas, peran kelompok formal akan terus menghadapi jalan buntu dalam upaya mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

b) Kelompok Berbasis Gender (Ibu-Ibu/PKK dan Kelompok Nelayan)

Kelompok berbasis gender, khususnya kelompok ibu-ibu melalui organisasi PKK dan kelompok ekonomi nelayan, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan karena frekuensi pertemuan yang rutin dan ikatan sosial yang kuat antaranggota. Kelompok ibu-ibu secara konsisten menjalankan berbagai kegiatan seperti arisan, senam bersama, pengajian, dan posyandu yang dapat menjadi wadah untuk menyisipkan pesan-pesan edukasi tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, kelompok nelayan yang terbentuk sebagai kelompok ekonomi juga memiliki tradisi gotong royong dalam mengelola sarana kerja mereka. Tingkat partisipasi dalam kelompok-kelompok ini relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, terutama di kalangan perempuan dewasa. Namun, kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum secara spesifik diarahkan untuk mengubah perilaku warga terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Ibu ML mengenai peran kelompok berbasis gender ini:

“.....adami dek itu kelompok Nelayan tapi memang kita tidak fokus ke lingkungan, kita itu fokus ta hasil olahan ikan dikasih jadi abon kah atau kerupuk kah, tidak pernah ki bahas bahas tentang lingkungan.....”

Pernyataan Ibu ML mengungkap bahwa meskipun kelompok nelayan ada dan aktif bertemu secara rutin, fokus kegiatan mereka sepenuhnya berorientasi pada aspek ekonomi produktif yaitu pengolahan hasil ikan menjadi produk bernilai tambah seperti abon dan kerupuk. Frasa "tidak pernah ki bahas bahas tentang lingkungan" menunjukkan bahwa isu lingkungan sama sekali tidak masuk dalam agenda atau diskusi kelompok, bahkan sebagai topik sampingan. Kondisi ini mencerminkan pemisahan yang sangat tegas antara kepentingan ekonomi dengan kepedulian lingkungan dalam pola pikir kelompok. Padahal, kelompok nelayan sebenarnya memiliki ketergantungan langsung terhadap kualitas lingkungan laut dan pesisir, pencemaran dari sampah dan limbah yang mereka buang justru akan merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketiadaan kesadaran akan keterkaitan antara lingkungan dan keberlanjutan ekonomi mereka menunjukkan bahwa edukasi tentang konsep pembangunan berkelanjutan belum menyentuh kelompok ini. Kelompok yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan laut justru tidak menjadikan isu ini sebagai prioritas atau bahkan perhatian.

Situasi serupa juga terjadi pada kelompok ibu-ibu PKK yang sebenarnya memiliki struktur organisasi yang lebih formal dan mandate yang lebih luas. Staf Kelurahan menyatakan:

".....itu adaji ibu ibu PKK tapi memang dia sekarang fokusnya ke kader posyandu, kalau untuk lingkungan peduji juga tapi kurang aktif disitu"

Pernyataan staf kelurahan ini mengungkap adanya pergeseran prioritas dan fragmentasi fokus dalam kelompok ibu-ibu PKK. Meskipun PKK secara struktural memiliki 10 program pokok yang mencakup kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan keluarga, dalam praktiknya fokus utama mereka telah terkonsentrasi pada peran sebagai kader posyandu yang menangani kesehatan ibu dan anak. Frasa "kalau untuk lingkungan peduji juga tapi kurang aktif disitu" menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan, namun tidak diterjemahkan menjadi aksi konkret dan konsisten. Kondisi ini mencerminkan masalah prioritas dan alokasi sumber daya, karena beban kerja sebagai kader posyandu sudah cukup berat, isu lingkungan menjadi terabaikan meskipun diakui sebagai hal yang penting. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada awareness tentang pentingnya lingkungan, tidak ada mekanisme atau sistem yang mendorong kelompok ini untuk mengambil

peran aktif dalam edukasi lingkungan. Ketidakaktifan dalam isu lingkungan juga bisa disebabkan oleh ketiadaan panduan, pendampingan, atau insentif yang membuat isu ini menjadi prioritas dalam agenda kegiatan PKK. Yang memprihatinkan adalah bahwa kelompok dengan partisipasi tinggi dan struktur organisasi yang kuat ini tidak dimobilisasi secara optimal untuk mengintegrasikan pesan-pesan lingkungan ke dalam kegiatan rutin mereka, padahal kesehatan ibu dan anak yang menjadi fokus posyandu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

Secara keseluruhan, kedua pernyataan di atas menggambarkan kegagalan pemanfaatan potensi kelompok berbasis gender sebagai agen perubahan lingkungan. Meskipun kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok nelayan memiliki keunggulan berupa pertemuan rutin, ikatan sosial kuat, dan partisipasi tinggi, potensi ini tidak dimanfaatkan karena fokus kegiatan yang sangat sempit dan sektoral. Kelompok nelayan hanya fokus pada pengolahan ekonomi (abon, kerupuk) dan sama sekali tidak membahas isu lingkungan "tidak pernah ki bahas bahas tentang lingkungan", padahal mata pencaharian mereka sangat bergantung pada kualitas laut yang terancam pencemaran sampah. Sementara PKK meskipun mengakui pentingnya lingkungan ("peduji juga"), namun tidak aktif karena prioritas utama sebagai kader posyandu. Yang ironis adalah kelompok yang fokus pada kesehatan ibu-anak justru tidak menjadikan lingkungan bersih, determinan kesehatan paling fundamental sebagai agenda konkret. Kondisi ini menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kegiatan kelompok yang sudah berjalan. Padahal, dengan pendampingan sederhana seperti menyisipkan pesan kebersihan dalam pengajian PKK atau mendiskusikan pentingnya laut bersih dalam pertemuan nelayan, kelompok-kelompok ini dapat menjadi pengungkit efektif perubahan perilaku. Tanpa integrasi semacam ini, modal sosial yang sudah ada akan terus terbuang percuma.

c) Tokoh Masyarakat dan Inisiatif Individual

Tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai *opinion leader* yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku warga melalui kharisma, pengalaman, dan kepercayaan yang telah dibangun dalam komunitas. Ketika tokoh masyarakat berbicara atau mengambil tindakan, warga cenderung mendengarkan dan mengikuti karena adanya rasa hormat dan legitimasi sosial yang melekat pada

mereka. Selain tokoh formal, terdapat pula inisiatif-inisiatif individual dari warga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan berusaha mengambil peran aktif meskipun tanpa dukungan kelembagaan. Contoh nyata adalah sosok seperti DN yang secara sukarela menjadi petugas kebersihan mengangkut sampah warga. Namun, peran tokoh masyarakat dan inisiatif individual ini belum optimal karena berbagai keterbatasan, termasuk kurangnya dukungan sistematis dan keberlanjutan. Berikut penuturan DN inisiatif individual dalam upaya perbaikan lingkungan:

".....dulu saya itu dek yang keliling pergi ambil sampah satu hari itu bisa 2-3 kali saya keliling pakai gerobak, cuma saya tidak tau tiba tiba dipanggil sama Pak RW dia bilang berhenti mki adami ganti ta jadi saya berhenti mi, saya tidak pernah persoalkan gaji nya dek saya Ikhlas yang jelas tempat tinggal ku bersih....."

Pernyataan DN mengungkap kisah yang sangat inspiratif sekaligus menyedihkan tentang nasib inisiatif individual dalam konteks sistem yang tidak mendukung. DN menunjukkan dedikasi luar biasa dengan secara sukarela mengangkut sampah warga 2-3 kali sehari menggunakan gerobak, didorong murni oleh motivasi intrinsik untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya "saya Ikhlas yang jelas tempat tinggal ku bersih". Frasa "saya tidak pernah persoalkan gaji nya" menunjukkan bahwa motivasinya bukan material tetapi kepedulian tulus terhadap lingkungan, yang merupakan modal sosial sangat berharga yang seharusnya didukung dan diperkuat oleh sistem. Namun, alih-alih mendapat dukungan dan apresiasi, inisiatif mulia ini justru dihentikan secara tiba-tiba oleh RW dengan alasan "adami ganti ta" (sudah ada penggantinya). Kebingungan DN "saya tidak tau tiba tiba dipanggil" mencerminkan tidak adanya komunikasi dan penghargaan terhadap kontribusinya. Yang lebih tragis adalah bahwa pemberhentian ini dilakukan tanpa evaluasi atau penjelasan yang memadai, dan kemungkinan besar tidak ada pengganti yang benar-benar berfungsi sehingga kondisi kebersihan kembali memburuk setelah DN berhenti. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem yang tidak terorganisir dengan baik justru mematikan inisiatif positif dari masyarakat, dan mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap *civic engagement* yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan berbasis masyarakat.

Pengalaman DN mewakili kegagalan sistemik dalam mengelola dan mempertahankan inisiatif individual yang sebenarnya merupakan aset berharga

dalam upaya perbaikan lingkungan di kawasan kumuh. Inisiatif sukarela semacam ini sangat langka dalam konteks di mana mayoritas warga bersikap apatis dan enggan berkontribusi bahkan untuk kegiatan kolektif yang terorganisir. DN menunjukkan model ideal warga yang memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungannya, bekerja tanpa pamrih dan konsisten dalam jangka waktu tertentu. Namun, alih-alih mendapat dukungan, fasilitasi, atau bahkan sekadar apresiasi dari struktur formal seperti RW atau kelurahan, inisiatif ini justru dihentikan secara sepihak tanpa komunikasi yang baik. Pemberhentian dengan alasan "sudah ada pengganti" yang kemungkinan besar tidak terwujud atau tidak berfungsi dengan baik, menunjukkan lemahnya koordinasi dan sistem manajemen relawan atau petugas kebersihan di tingkat RT/RW. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan tidak adanya mekanisme untuk mengidentifikasi, mendukung, dan mengembangkan inisiatif-inisiatif positif dari masyarakat. Padahal, dalam konteks keterbatasan sumber daya pemerintah dan rendahnya partisipasi warga, individu-individu seperti DN seharusnya menjadi aset yang dipelihara, didukung dengan fasilitas yang memadai, dan bahkan dijadikan contoh untuk menginspirasi warga lain. Pengalaman ini juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh warga yang berinisiatif, alih-alih mendapat penghargaan, mereka justru mengalami pemberhentian yang membingungkan, yang pada akhirnya dapat menciptakan disinsentif bagi orang lain untuk mengambil inisiatif serupa di masa depan. Tanpa sistem yang menghargai dan memfasilitasi inisiatif individual, serta memastikan keberlanjutannya melalui dukungan kelembagaan yang konsisten, potensi civic engagement akan terus terbuang dan masyarakat akan semakin bergantung pada intervensi eksternal yang sporadis dan tidak berkelanjutan.

d) Pemuda/Remaja (Karang Taruna/Remaja Masjid)

Generasi muda seharusnya menjadi motor penggerak perubahan dan regenerasi nilai-nilai positif dalam masyarakat, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Pemuda dan remaja memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang dapat dimanfaatkan untuk menginisiasi gerakan-gerakan perubahan perilaku yang inovatif dan berkelanjutan. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan kelompok remaja masjid seharusnya menjadi wadah untuk mengkanalkan potensi ini ke dalam kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan yang konkret. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam

kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang terkait dengan lingkungan, sangat rendah. Berikut penjelasan Ibu NL tentang kondisi pemuda dalam upaya edukasi peningkatan kesadaran lingkungan:

“.....disini aktif ji dek itu kayak kelompok remaja remaja masjid nya tapi itu pun kalau mau ji 17an tidak adaji kegiatannya selain itu, adaji juga iya kelompok pemuda tapi tidak aktif ki ji juga di lingkungan dia aktif di Budaya ki.....”

Pernyataan Ibu NL mengungkap kondisi organisasi kepemudaan yang ada namun tidak berfungsi optimal dalam konteks pembangunan masyarakat, khususnya isu lingkungan. Kelompok remaja masjid memang ada dan "aktif ji", namun keaktifan tersebut sangat terbatas dan bersifat sporadis hanya muncul menjelang perayaan 17 Agustus dan kemudian hilang hingga tahun berikutnya. Frasa "tidak adaji kegiatannya selain itu" menunjukkan tidak ada keberlanjutan program atau kegiatan rutin yang dapat membangun momentum dan konsistensi partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan. Lebih jauh lagi, meskipun ada kelompok pemuda lain yang eksis, fokus mereka adalah pada kegiatan budaya bukan pada isu-isu lingkungan atau sosial kemasyarakatan "tidak aktif ki ji juga di lingkungan dia aktif di Budaya ki". Kondisi ini mencerminkan misprioritization di mana energi dan kreativitas pemuda tersalurkan ke aktivitas yang bersifat hiburan atau ekspresi seni tanpa kontribusi langsung terhadap perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Fenomena ini juga menunjukkan tidak adanya fasilitasi atau bimbingan dari pihak kelurahan atau tokoh masyarakat untuk mengarahkan potensi pemuda ke kegiatan-kegiatan yang lebih berdampak pada kesejahteraan kolektif. Yang memprihatinkan adalah bahwa pemuda yang seharusnya menjadi agen inovasi dan perubahan justru tidak terlibat sama sekali dalam diskusi atau aksi terkait lingkungan, sehingga tidak ada regenerasi kepemimpinan dan kepedulian lingkungan untuk masa depan.

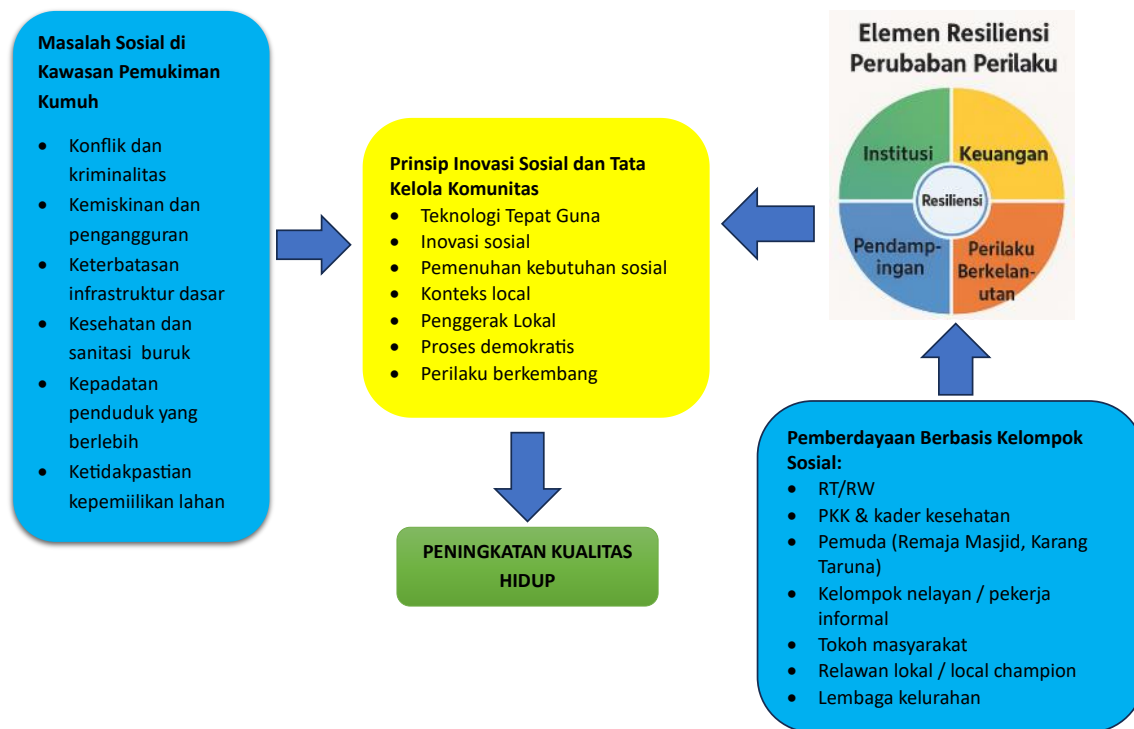
Pernyataan Ibu NL menggambarkan kegagalan dalam mengoptimalkan potensi generasi muda sebagai agen perubahan di kawasan kumuh. Meskipun organisasi kepemudaan secara struktural ada, baik remaja masjid maupun kelompok pemuda lainnya, keberadaan mereka tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan. Keaktifan yang bersifat insidental dan temporer, hanya muncul saat acara besar seperti 17 Agustus, menunjukkan tidak ada program berkelanjutan yang dapat membangun habit dan komitmen jangka panjang terhadap kegiatan

kemasyarakatan. Lebih problematik lagi adalah bahwa ketika pemuda memilih untuk aktif dalam organisasi, fokus mereka justru pada kegiatan budaya yang tidak terkait dengan isu-isu mendesak di lingkungan mereka seperti sampah, kebersihan, dan sanitasi. Fenomena ini mencerminkan beberapa masalah mendasar. Pertama, tidak ada upaya sistematis dari pemerintah kelurahan atau tokoh masyarakat untuk memfasilitasi dan membimbing organisasi kepemudaan agar fokus pada isu-isu strategis; kedua, tidak ada insentif atau daya tarik yang membuat isu lingkungan menarik bagi pemuda dibandingkan dengan kegiatan budaya atau hiburan; ketiga, mungkin ada persepsi bahwa kegiatan lingkungan adalah urusan orang tua dan pemerintah, bukan tanggung jawab generasi muda. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena tanpa keterlibatan pemuda, tidak akan ada regenerasi kepemimpinan dan kepedulian lingkungan di masa depan. Ketika generasi yang lebih tua dengan nilai gotong royong yang lebih kuat sudah tidak ada lagi, sementara generasi muda tidak pernah dibiasakan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, kondisi lingkungan di kawasan kumuh akan semakin memburuk. Diperlukan intervensi yang dapat membuat isu lingkungan menjadi relevan dan menarik bagi pemuda, misalnya melalui kompetisi, penggunaan media sosial, atau proyek-proyek kreatif yang mengombinasikan minat mereka terhadap budaya dengan aksi lingkungan konkret, sehingga energi dan kreativitas mereka dapat tersalurkan untuk perubahan yang berdampak nyata.

C. Model Pemberdayaan Aplikatif

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa kompleksitas permasalahan di kawasan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi fisik semata. Diperlukan suatu model pemberdayaan yang komprehensif dan aplikatif yang mampu mengintegrasikan berbagai elemen strategis untuk mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat secara berkelanjutan. Model pemberdayaan aplikatif yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan kelompok sosial sebagai motor penggerak utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh. Model ini dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di dalam masyarakat, serta mengadopsi prinsip-prinsip inovasi sosial yang telah terbukti efektif dalam berbagai praktik pemberdayaan masyarakat. Secara skematis,

model pemberdayaan aplikatif berbasis kelompok sosial untuk kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 4.5 Skema Model Pemberdayaan Aplikatif

Model pemberdayaan aplikatif yang dikembangkan dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman mendalam bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar menghadapi permasalahan yang bersifat multidimensional. Temuan lapangan menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah yang telah dilaksanakan, seperti KOTAKU, PLPBK, dan program bedah rumah, belum mampu memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan selama ini lebih berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik tanpa disertai dengan upaya sistematis untuk mengubah perilaku sosial masyarakat. Akibatnya, fasilitas yang telah dibangun seringkali tidak terawat, kembali rusak dalam waktu singkat, dan kondisi lingkungan kembali memburuk seperti sebelumnya.

Model ini dibangun berdasarkan teori inovasi sosial yang menekankan pentingnya solusi yang lahir dari dalam masyarakat sendiri, bukan sekadar intervensi dari luar yang bersifat top-down. Inovasi sosial memandang bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terjadi ketika masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proses dan hasil perubahan tersebut. Dengan demikian, peran kelompok sosial menjadi sangat strategis karena mereka merupakan struktur yang sudah ada

dan mengakar di dalam masyarakat, memiliki legitimasi sosial, serta mampu menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Model pemberdayaan ini menempatkan identifikasi masalah sosial sebagai titik berangkat yang fundamental. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat enam kategori masalah sosial utama yang menjadi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar. Pertama, konflik dan kriminalitas yang mencakup tingginya angka tawuran antarkelompok pemuda, penyalahgunaan narkoba yang bersifat turun-temurun, serta pencurian yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang sulit. Situasi ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan warga, bahkan tokoh masyarakat pun merasa kesulitan untuk menegakkan norma sosial karena khawatir memicu konflik yang lebih besar.

Kedua, kemiskinan dan pengangguran yang merupakan akar dari berbagai permasalahan lainnya. Data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kawasan kumuh bekerja sebagai buruh harian, nelayan, atau pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap program bantuan sosial pemerintah, di mana sekitar 70 persen warga menjadi penerima bantuan seperti PKH dan sembako. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar yang meliputi sempitnya akses jalan, ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang memadai, serta terbatasnya sumber air bersih. Kondisi geografis kawasan pesisir yang menjadi lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Tallo dan Bontorannu semakin memperparah permasalahan ini.

Keempat, kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk sebagai konsekuensi langsung dari keterbatasan infrastruktur dan perilaku masyarakat yang tidak sehat. Praktik buang air besar sembarangan, terutama di kolong rumah panggung yang kemudian terbilas oleh pasang surut air laut, menciptakan lingkungan yang tidak higienis dan berisiko tinggi terhadap berbagai penyakit. Kelima, kepadatan penduduk yang berlebih dengan rumah-rumah yang saling berdempetan tanpa jarak yang memadai, lorong-lorong sempit yang hanya dapat dilalui satu orang, serta kondisi di mana satu unit rumah dihuni oleh dua hingga tiga kepala keluarga. Keenam, ketidakpastian kepemilikan lahan di mana banyak warga menempati tanah negara atau wilayah pesisir secara turun-temurun tanpa status legal yang jelas, sehingga menghambat investasi untuk perbaikan hunian secara permanen.

Komponen kedua dalam model ini adalah penerapan prinsip-prinsip inovasi sosial dan tata kelola komunitas yang menjadi kerangka kerja strategis untuk transformasi

sosial. Prinsip teknologi tepat guna menekankan pentingnya solusi yang sesuai dengan kapasitas dan sumber daya masyarakat setempat. Dalam konteks kawasan kumuh, teknologi tepat guna dapat berupa sistem pengelolaan sampah sederhana berbasis komunitas, pengolahan limbah organik menjadi kompos, atau sistem sanitasi komunal yang dapat dikelola secara mandiri oleh warga. Teknologi ini tidak harus canggih atau mahal, tetapi harus dapat dioperasikan, dipelihara, dan direplikasi oleh masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Prinsip inovasi sosial sendiri menekankan bahwa solusi untuk permasalahan sosial harus lahir dari kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, inovasi sosial menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif merumuskan dan mengimplementasikan solusi. Prinsip pemenuhan kebutuhan sosial mengarahkan bahwa setiap intervensi harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan pada kepentingan administratif atau proyek pemerintah semata. Hal ini memerlukan proses partisipatif dalam identifikasi kebutuhan dan perumusan program.

Prinsip konteks lokal menggarisbawahi pentingnya memahami karakteristik sosial budaya setempat dalam merancang program pemberdayaan. Masyarakat di kawasan kumuh Makassar memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, tradisi gotong royong yang meskipun mulai melemah namun masih dapat direvitalisasi, serta struktur sosial informal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kolektif. Prinsip penggerak lokal atau local champion menegaskan bahwa perubahan berkelanjutan membutuhkan tokoh-tokoh dari dalam masyarakat yang dapat menjadi pelopor, teladan, dan penggerak perubahan. Pengalaman DN yang secara sukarela mengangkut sampah warga menunjukkan bahwa potensi penggerak lokal sebenarnya ada, namun membutuhkan dukungan sistematis agar dapat berkembang dan berkelanjutan.

Prinsip proses demokratis menekankan bahwa setiap pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif. Hal ini tidak hanya menjamin legitimasi program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan kolektif yang krusial untuk keberlanjutan. Terakhir, prinsip perilaku berkembang mengakui bahwa perubahan perilaku adalah proses gradual yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan penguatan positif secara berkelanjutan.

Perubahan tidak dapat dipaksakan secara instan, tetapi harus difasilitasi melalui edukasi, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung.

Model pemberdayaan ini mengintegrasikan konsep resiliensi sebagai kerangka untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku. Resiliensi dalam konteks ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan perilaku positif yang telah terbentuk, sekaligus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi. Terdapat empat elemen resiliensi yang saling terkait dan saling menguatkan dalam model ini.

Elemen institusi merujuk pada penguatan kelembagaan di tingkat komunitas yang dapat menjadi wadah untuk mengorganisir, mengkoordinasi, dan memelihara praktik-praktik positif. Institusi ini mencakup baik struktur formal seperti RT/RW dan lembaga kelurahan, maupun struktur informal seperti kelompok arisan, pengajian, dan paguyuban nelayan. Penguatan institusi dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, penyusunan aturan main yang disepakati bersama, serta pembangunan mekanisme akuntabilitas dan transparansi.

Elemen keuangan menekankan pentingnya kemandirian finansial untuk mendukung keberlanjutan program. Pengalaman menunjukkan bahwa program yang sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah cenderung terhenti ketika dukungan eksternal berakhir. Oleh karena itu, model ini mendorong pengembangan mekanisme pendanaan berbasis komunitas seperti iuran warga, pengelolaan bank sampah yang menghasilkan pendapatan, atau koperasi simpan pinjam yang dananya dapat dialokasikan untuk kegiatan lingkungan.

Elemen pendampingan mengakui bahwa masyarakat membutuhkan dukungan teknis dan motivasional secara berkelanjutan, terutama pada tahap awal perubahan. Pendampingan dapat dilakukan oleh fasilitator dari lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau relawan yang memiliki kompetensi dan komitmen. Namun, pendampingan harus dirancang dengan prinsip pemberdayaan, yaitu secara bertahap mengurangi intensitas pendampingan seiring dengan meningkatnya kemandirian masyarakat. Elemen perilaku berkelanjutan merupakan tujuan akhir dari seluruh proses pemberdayaan. Perilaku berkelanjutan tidak sekadar perubahan sesaat, tetapi transformasi yang terinternalisasi menjadi kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Komponen inti dari model ini adalah pemberdayaan yang berbasis pada kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

meskipun kelompok-kelompok sosial ini ada dan memiliki kegiatan rutin, potensi mereka belum dioptimalkan untuk mendukung perubahan perilaku terhadap lingkungan. Model ini mengidentifikasi tujuh kategori kelompok sosial yang dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan.

RT/RW sebagai struktur formal di tingkat paling bawah memiliki legitimasi dan otoritas untuk mengkoordinasi kegiatan warga. Meskipun temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas RT/RW dalam mobilisasi warga masih rendah, struktur ini tetap penting sebagai simpul koordinasi dan komunikasi. PKK dan kader kesehatan merupakan kelompok yang sudah memiliki tradisi pertemuan rutin dan jaringan yang kuat hingga ke tingkat rumah tangga. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan seperti arisan, pengajian, posyandu, dan senam bersama dapat menjadi wahana untuk menyisipkan pesan-pesan edukasi tentang kesehatan lingkungan.

Pemuda melalui organisasi Remaja Masjid dan Karang Taruna memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang dapat dimanfaatkan untuk menginisiasi gerakan perubahan yang inovatif. Kelompok nelayan dan pekerja informal merupakan kelompok ekonomi yang memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas lingkungan, terutama lingkungan pesisir dan laut. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan perilaku warga melalui kharisma dan kepercayaan yang telah terbangun. Relawan lokal atau local champion adalah individu-individu yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan untuk berkontribusi secara sukarela. Terakhir, lembaga kelurahan sebagai representasi pemerintah di tingkat paling bawah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan kebijakan, anggaran, dan koordinasi lintas sektor.

Model pemberdayaan aplikatif ini bekerja melalui mekanisme yang bersifat siklikal dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah pemetaan masalah dan potensi yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Tahap kedua adalah penguatan kapasitas kelompok sosial melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Tahap ketiga adalah implementasi program-program perubahan perilaku yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip inovasi sosial. Tahap keempat adalah pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi tantangan. Tahap kelima adalah penyesuaian dan penguatan berkelanjutan berdasarkan pembelajaran dari proses implementasi.

Seluruh komponen dan proses dalam model ini bermuara pada satu tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

Peningkatan kualitas hidup ini mencakup dimensi fisik berupa perbaikan kondisi lingkungan, sanitasi, dan infrastruktur dasar; dimensi sosial berupa penguatan kohesi sosial, solidaritas, dan kontrol sosial; dimensi ekonomi berupa peningkatan produktivitas dan pengurangan beban pengeluaran akibat penyakit; serta dimensi psikologis berupa peningkatan harga diri, harapan, dan optimisme masyarakat terhadap masa depan.

Implementasi model pemberdayaan aplikatif ini memerlukan komitmen dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Makassar melalui dinas-dinas terkait perlu menyediakan dukungan kebijakan yang memungkinkan kelompok sosial berperan lebih aktif dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan berbasis komunitas perlu ditingkatkan dengan orientasi pada penguatan kapasitas kelompok sosial, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah kelurahan sebagai garda terdepan dalam implementasi program di tingkat akar rumput perlu diberdayakan dengan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi kerja-kerja kelompok sosial.

Akademisi dan lembaga penelitian dapat berperan dalam menyediakan pendampingan teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis bukti, serta mendokumentasikan pembelajaran untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam fasilitasi dan pendampingan kelompok sosial di tingkat komunitas. Sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berkontribusi dalam penyediaan sumber daya dan teknologi yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh.

Yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat sendiri untuk berubah dan berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Perubahan paradigma dari mentalitas penerima bantuan menjadi agen perubahan yang aktif memerlukan proses transformasi kesadaran yang tidak instan. Oleh karena itu, kesabaran, konsistensi, dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan implementasi model ini. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, model pemberdayaan aplikatif berbasis kelompok sosial ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman kumuh Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Bontorannu dan Kelurahan Tallo, dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar menghadapi permasalahan multidimensional yang saling terkait antara kondisi fisik lingkungan, perilaku sosial masyarakat, dan lemahnya peran kelompok sosial dalam mendorong perubahan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memprihatinkan ditandai dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, ketergantungan pada pekerjaan informal yang tidak menentu, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti pengelolaan sampah, drainase yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan sanitasi yang tidak memadai. Permasalahan ini diperparah dengan tingginya tingkat konflik dan kriminalitas, kepadatan penduduk yang berlebihan akibat pola hunian multi-generasi dalam satu lahan, serta ketidakpastian status kepemilikan lahan yang menciptakan kecemasan berkelanjutan bagi masyarakat. Fenomena ini menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman kumuh tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pembangunan fisik semata, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku sosial masyarakat menjadi faktor krusial yang menghambat upaya peningkatan kualitas hidup di kawasan kumuh. Sikap apatis dan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah, perilaku tidak sehat terhadap lingkungan seperti membuang sampah sembarangan ke sungai dan lahan kosong, lemahnya solidaritas sosial dan mekanisme kontrol sosial, serta partisipasi selektif yang hanya muncul ketika ada manfaat individual langsung, telah menjadi penghalang serius bagi berbagai program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan. Kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat seperti RT/RW, PKK, kelompok nelayan, remaja masjid, dan Karang Taruna sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, namun peran tersebut belum dioptimalkan karena fokus kegiatan yang sangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan isu lingkungan. Model pemberdayaan aplikatif berbasis kelompok sosial yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan solutif dengan mengaktivasi dan mensinergikan peran berbagai kelompok sosial melalui prinsip inovasi sosial, akselerasi perubahan, dan partisipasi inklusif untuk membangun

resiliensi komunitas dan perilaku berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kawasan kumuh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar. Rekomendasi ini juga menekankan urgensi penyusunan *policy brief* (ringkasan kebijakan) sebagai instrumen untuk menjembatani temuan penelitian dengan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mendukung pelaksanaan program-program prioritas dalam RPJMD Kota Makassar 2025-2029:

1. Perbaiki Tata Kelola Sampah dengan Sistem yang Konsisten dan Terjangkau

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan sistem pengelolaan sampah di kawasan kumuh disebabkan oleh ketiadaan tempat penampungan sampah (TPS) yang memadai, jarak yang jauh ke lokasi pembuangan, ketidakteraturan jadwal pengangkutan, serta inkonsistensi kebijakan pembebasan iuran sampah yang justru menghentikan layanan pengangkutan swadaya. Perlu segera dibangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pembentukan bank sampah tingkat RT/RW, penyediaan TPS di setiap lorong, dan pengangkutan terjadwal yang konsisten. Sistem iuran berbasis kemampuan ekonomi perlu diterapkan dengan mekanisme subsidi silang yang jelas.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029: Rekomendasi ini mendukung implementasi *Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana*, khususnya melalui Program Pengelolaan Persampahan yang bertujuan meningkatkan cakupan penanganan sampah dan pengurangan timbulan sampah melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Perlu disusun *policy brief* tentang model pengelolaan sampah berbasis komunitas di kawasan kumuh sebagai panduan teknis bagi dinas terkait dalam mengimplementasikan program ini secara tepat sasaran.

2. Normalisasi Perilaku Lingkungan Melalui Aturan Tegas dan Sanksi Sosial

Penelitian mengungkap bahwa mekanisme kontrol sosial di kawasan kumuh telah lumpuh karena ketakutan akan konflik dan keengganan menegur perilaku menyimpang. Perilaku membuang sampah ke sungai dan lahan kosong telah menjadi norma yang diterima secara luas. Diperlukan intervensi sistematis untuk menormalisasi kembali perilaku positif melalui penerbitan peraturan

desa/kelurahan tentang kebersihan lingkungan dengan sanksi yang tegas namun proporsional, pembentukan tim pengawas lingkungan berbasis warga, serta program penghargaan bagi RT/RW yang konsisten menjaga kebersihan.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029: Sejalan dengan *Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum*, rekomendasi ini dapat diintegrasikan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kelurahan. Penyusunan *policy brief* tentang mekanisme sanksi sosial dan insentif berbasis komunitas sangat diperlukan untuk memberikan landasan konseptual bagi peraturan kelurahan yang akan diterbitkan, sekaligus menjadi acuan bagi pembinaan aparatur kelurahan.

3. Pembangunan Sistem Sanitasi Komunal pada Wilayah Pesisir dan Rumah Panggung

Kondisi geografis kawasan permukiman kumuh di pesisir dengan dominasi rumah panggung menyebabkan masyarakat kesulitan membangun sanitasi individual yang layak. Data menunjukkan bahwa akses sanitasi aman di Kota Makassar baru mencapai 8,45% pada tahun 2024, jauh dari target nasional 30%. Perlu diprioritaskan pembangunan IPAL Komunal skala lingkungan di kawasan pesisir dengan desain khusus yang mengakomodasi karakteristik rumah panggung, disertai dengan pendampingan teknis pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029: Rekomendasi ini secara langsung mendukung *Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan*, khususnya melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan outcome meningkatnya akses rumah tinggal terhadap sanitasi aman, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan outcome meningkatnya jumlah rumah layak huni pada wilayah pencegahan kumuh. *Policy brief* tentang model sanitasi komunal adaptif untuk kawasan pesisir perlu segera disusun untuk menjadi landasan teknis dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program.

4. Penanganan Drainase dan Banjir dengan Program Pembersihan Terjadwal

Penelitian menemukan hubungan kausalitas yang jelas antara perilaku pembuangan sampah ke sungai dengan banjir yang kerap melanda kawasan kumuh. Sampah yang menyumbat saluran drainase menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar dan meluap ke rumah-rumah warga saat hujan. Perlu

diimplementasikan program pembersihan saluran drainase secara terjadwal dengan melibatkan partisipasi masyarakat, penyediaan peralatan pembersihan di tingkat RT/RW, serta normalisasi fungsi sungai sebagai saluran drainase alami melalui program restorasi bantaran sungai.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029: Sejalan dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam RPJMD yang menargetkan outcome meningkatnya perlindungan masyarakat dari banjir dan genangan, serta Program Kawasan Permukiman dengan outcome menurunnya luas kawasan kumuh. Penyusunan *policy brief* tentang integrasi penanganan drainase dengan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengubah paradigma dari pendekatan infrastruktur semata menjadi pendekatan sosio-teknis yang melibatkan perubahan perilaku masyarakat.

5. Penguatan Partisipasi Sosial yang Konsisten, Bukan Insidental

Temuan menunjukkan bahwa kelompok sosial seperti PKK, remaja masjid, kelompok nelayan, dan Karang Taruna memiliki kegiatan rutin namun sama sekali tidak membahas isu lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong sangat rendah dan hanya bersifat insidental pada momen-momen tertentu seperti 17 Agustus. Diperlukan program penguatan kapasitas kelompok sosial melalui pelatihan, pendampingan, dan integrasi isu lingkungan ke dalam agenda kegiatan rutin setiap kelompok. Model pemberdayaan berbasis kelompok sosial yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi panduan operasional.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029: Rekomendasi ini sangat relevan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang tersebar di berbagai urusan pemerintahan dalam RPJMD 2025-2029. Secara khusus mendukung pencapaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan outcome meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan. Penyusunan *policy brief* komprehensif tentang model pemberdayaan kelompok sosial untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi sangat strategis sebagai instrumen untuk menjembatani hasil penelitian ini dengan implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus menjadi alat advokasi kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya pendekatan sosial dalam penanganan kawasan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, D. (2001). *Bahan ajar psikologi anak*. Jakarta.
- Ginting, A. L. (2019). Interelasi pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10957>
- Ibrahim, R. (2001). *Landasan psikologis pendidikan jasmani di sekolah dasar*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Lestari, I. D., & Sugiri, A. (2013). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Podosugih, Kota Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK*, 2(1), 30–41.
- Maclver, R. M., & Page, C. H. (1957). *Society: An introductory analysis*. New York: Rinehart and Company Inc.
- Merton, R. K. (1967). *Social theory and social structure*. New York: The Free Press.
- Najib, M. (2005). Perilaku pemukim terhadap lahan permukiman sekitar sungai di kawasan pusat kota. *MEKTEK*, 7(2).
- Newcomb, T., dkk. (1981). *Psikologi sosial* (Terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia). Diponegoro.
- Notoadmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Polak, M. (1985). *Sosiologi: Suatu buku pengantar ringkas*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami kemiskinan dan mengatasi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1).
- Putro, J. D. (2011). Penataan kawasan kumuh pinggiran sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 23.
- Soekanto, S. (1983). *Teori sosiologi tentang perubahan sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetomo. (2010). *Masalah sosial dan upaya pemecahannya* (Cet. II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan, I. B. (2015). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, S. A. (2021). Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, 4(1), 584–591.
- Hidayanti, I. (2021). Urbanisasi dan dampak sosial di kota besar Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 213.
- Maharani, A. R., Wargadalem, F. R., & Safitri, S. (2024). Urbanisasi dalam tinjauan historis: Studi kasus permukiman kumuh di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang, 2010–2020. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(1), 30–51.
- Mappe, H. A. (2024). Permukiman kumuh di Kota Makassar: Sebuah tinjauan sosiologis. *Jurnal Predestination*, 6(2), 46–53.
- Mungkasa. (2024). *Pengembangan kawasan permukiman kumuh berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat di kawasan kumuh Kota Makassar* [Disertasi].
- Nabila, F. A. (2023). Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program penanganan permukiman kumuh di Gampong Seutui. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 12(1), 22–29.
- Rachman, D. T., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Perubahan kondisi sosial budaya masyarakat permukiman kumuh akibat urbanisasi di Kota Surabaya. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(2), 123–130.

- Rahayu, I., & Jaharuddin, W. A. (2020). Identifikasi karakteristik permukiman kumuh di sekitar Taman Maccini Sombala Kota Makassar. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 14(2), 187–194.
- Rudianto, S. R. (2024). Analisis kawasan permukiman kumuh As Jeneberang Kota Makassar. *Jurnal PBUP*, 7(1), 19–24.
- Tumeang, N. M. (2023). Permukiman kumuh sebagai bentuk kesenjangan di perkotaan (Studi kasus Kelurahan Glugur Darat di Kota Medan). *Jurnal Sosiologi*, 6(2), 52–65.
- Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan dynamic governance terhadap tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi di Kota Depok tahun 2022. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(3), 202–212.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Lingkungan (Rumusan Masalah 1)

- Bagaimana Bapak/Ibu menggambarkan kondisi lingkungan tempat tinggal saat ini?
- Apa masalah sosial utama yang paling sering dihadapi masyarakat di kawasan ini?
- Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengakses layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi, kesehatan)?
- Bagaimana kondisi pendidikan anak-anak dan akses mereka ke sekolah?
- Bagaimana keamanan lingkungan ini, dan bagaimana pola hubungan sosial antarwarga terbentuk?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah ini?

B. Perilaku Sosial dan Kesadaran Masyarakat (Rumusan Masalah 2)

- Bagaimana sikap masyarakat terhadap kebersihan dan pemeliharaan lingkungan?
- Apakah ada keterlibatan aktif warga dalam kegiatan sosial atau penataan lingkungan?
- Faktor apa saja yang menurut Bapak/Ibu membuat masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan?
- Bagaimana pengaruh ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup perkotaan terhadap perilaku sosial masyarakat di sini?
- Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan perilaku sosial yang positif/negatif dalam beberapa tahun terakhir?

C. Peran Kelompok Sosial dan Tokoh Masyarakat (Rumusan Masalah 3)

- Apakah ada kelompok sosial/komunitas warga yang aktif di lingkungan ini? Apa saja kegiatan mereka?
- Bagaimana peran kelompok sosial dalam membangun kepedulian dan solidaritas antarwarga?
- Apakah kelompok sosial ini berkolaborasi dengan pemerintah atau lembaga lain?
- Apa tantangan yang dihadapi kelompok sosial dalam mengedukasi masyarakat?
- Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk dukungan yang dibutuhkan agar kelompok sosial lebih efektif?
- Apakah ada kelompok atau tokoh tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di lingkungan ini?
- Bagaimana kepentingan kelompok atau tokoh tersebut memengaruhi kondisi sosial dan lingkungan di kawasan ini?
- Apakah ada kelompok yang lebih diuntungkan atau justru dirugikan dari program atau kebijakan yang masuk ke kawasan ini?
- Bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kelompok berkuasa dengan warga biasa?
- Apakah pernah terjadi ketegangan antara kepentingan kelompok dominan dan kebutuhan masyarakat luas? Bagaimana biasanya diselesaikan?

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya keseimbangan kepentingan antara kelompok berpengaruh dan masyarakat dijaga agar lebih adil?

D. Harapan dan Solusi

- Perubahan apa yang paling Bapak/Ibu harapkan terhadap kondisi sosial di kawasan ini?
- Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah, komunitas, dan warga untuk meningkatkan kualitas hidup?

DOKUMENTASI

KELURAHAN BONTORANNU



KELURAHAN TALLO

